

**REALISASI PASAL 84 TENTANG KAMPANYE
POLITIK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PENGURUS CABANG SAIL TINJAUAN
MENURUT FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)**



OLEH

PRI HARTONO SIMANJUNTAK
NIM. 10524001124

**PROGRAM S.1
JURUSAN JINAYAH SIYASAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU
2010**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul ***“Realisasi Pasal 84 Tentang Kampanye Politik Dewan Pengurus Cabang Partai Keadilan Sejahtera Sail Tinjauan Menurut Fiqh Siyasah”***.

Pada dasarnya, kampanye dimaksudkan untuk mengenalkan calon pemimpin yang akan dipilih kepada pemilih yang dilakukan pada waktu pemilu diselenggarakan. Dalam pengertiannya, kampanye merupakan suatu kegiatan terorganisir untuk mempengaruhi pemilih dengan memunculkan pesan kepada khalyak bahwa sang calon layak untuk dipilih. Dalam pelaksanaannya, kampanye diatur oleh pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang. Guna untuk menciptakan pemilu yang bersih, tertib dan aman. Partai Keadilan Sejahtera sebagai salah satu partai yang mempunyai visi sebagai penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan ummat dan bangsa, juga ikut berpartisipasi dalam kampanye pemilu 2009 lalu. Dalam pelaksanaan kampanye politik yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera terdapat pelanggaran-pelanggaran yang disinyalir menurut pasal 84 UU Pemilu.

Berangkat dari hal tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana realisasi pasal 84 pada kampanye politik di Partai Keadilan Sejahtera dan apa faktor terjadinya pelanggaran serta bagaimana tinjauan fiqh siyasah.

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yang berlokasi di Kecamatan Sail yang menjadi populasinya kader dan pengurus sebagai peserta kampanye, sedangkan sampel berjumlah 30 orang.

Sementara itu dalam mendapatkan data di lapangan penulis lakukan dengan menggunakan teknik observasi, angket, wawancara dan studi dokumen, yang kemudian penulis analisa dengan menggunakan teknik analisa kualitatif dengan metode induktif, deduktif dan deskriptif.

Dari penelitian yang penulis lakukan terdapat bahwa telah terjadi pelanggaran pada kampanye politik Partai Keadilan Sejahtera yaitu pada pasal 84 ayat 1 huruf (e dan h) serta ayat 2 huruf (j) jika mengacu kepada pasal tersebut. Pelanggaran itu terjadi disebabkan karena faktor pengawasan, sosialisasi pasal yang kurang, keadaan dan penerapan sanksi.

Melihat hal di atas, dalam fiqh siyasah telah diatur bahwa tugas pemerintah adalah mengatur setiap urusan masyarakat untuk keadaan tertib, aman dan terkendali. Dalam hal memilih pemimpin pun ada etika yang harus ditaati warga negaranya. Jika pelanggaran itu terjadi disaat kampanye memilih pemimpin itu merupakan suatu pelanggaran terhadap etika politik. Sementara Islam menganjurkan supaya jujur dalam berkomunikasi dengan orang lain. Dan tidak mengotori kehormatan dan kemuliaan pihak lawan.

HALAMAN JUDUL	
NOTA PEMBIMBING	
LEMBARAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR -----	i
ABSTRAK -----	iii
DAFTAR ISI -----	iv
DAFTAR TABEL -----	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang -----	1
B. Rumusan Masalah -----	8
C. Batasan masalah -----	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian -----	9
E. Metode Penelitian -----	10
F. Sistematika Penulisan -----	13
 BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN DAN	
SELINTAS PKS SAIL	
A. Geografis -----	14
B. Demografis -----	15
C. Sejarah Berdirinya DPC PKS Sail-----	16
D. Struktur Organisasi -----	17
 BAB III TINJUAN TEORITIS TENTANG KAMPANYE POLITIK	
A. Pengertian Kampanye -----	20
B. Langkah-langkah Kampanye -----	24
C. Pengaruh Kampanye -----	32
D. Kampanye dalam Perspektif Fiqh Siyasah -----	34
E. Ketentuan Pasal 84 Tentang Kampanye Pemilu-----	42

BAB IV REALISASI PASAL 84 TENTANG KAMPANYE POLITIK

DI DPC SAIL PK SEJAHTERA TINJAUAN MENURUT

FIQH SIYASAH

- A. Realisasi Pasal 84 Tentang Kampanye Politik
di DPC PKS Sail----- 47
- B. Faktor Yang Menyebabkan Partai Keadilan Sejahtera
Melanggar Aturan Kampanye----- 58
- C. Tinjauan Fiqh Siyasa ----- 60

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan ----- 70
- B. Saran ----- 71

Daftar Pustaka72

Lampiran-lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memilih pemimpin merupakan salah satu keharusan yang tidak dapat dihindari dalam bermasyarakat dan bernegara. Pemilihan wakil rakyat, dalam kaca mata fiqh islam termasuk ke dalam jenis wakalah atau wikalah. Secara bahasa wakalah ini artinya penyerahan dan penjagaan. Adapun menurut istilah syar'i ialah seseorang mengangkat orang lain sebagai pengganti dirinya, secara mutlak ataupun secara terikat. Dengan kata lain penyebutan kepada pemilihan wakil rakyat ini adalah *Ahl al-hall wa al-'aqd* diartikan dengan “orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat.” Istilah ini dirumuskan oleh ulama fikih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka.¹

Di Indonesia pemilihan wakil rakyat dilakukan dengan menyelenggarakan pemilihan langsung dari rakyat yang disebut dengan Pemilihan Umum. Pemilihan Umum ini diselenggarakan dalam waktu lima tahun sekali. Sebelum pemilihan umum digelar para kandidat wakil rakyat diperkenalkan kepada calon pemilih dan diperbolehkan untuk menyampaikan visi dan misinya melalui kampanye politik.²

¹ Sujuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), Ed-1, Cet-4, h. 1

² Amandemen Kabinet Indonesia Bersatu Undang-Undang Dasar 1945 Periode 2004-2009, h. 76

Kampanye politik adalah sebuah upaya yang terorganisir bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih untuk memilih salah satu dari kandidat yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kampanye politik selalu merujuk pada kampanye pemilihan umum. KPU merupakan komisi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 22E ayat (5) yang berbunyi : Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.³

Penyelenggaraan Pemilu oleh KPU tidak hanya merujuk kepada UUD '45. Namun dalam ketentuannya juga merujuk kepada Undang-undang No 10 Tahun 2008. Didalam Undang-undang tersebut tersusun jelas tentang penyelenggaraan pemilu, mulai dari menyangkut tata cara pendaftaran calon, persyaratan calon, persyaratan kampanye calon sampai kepada penetapan calon yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

Dalam Undang-undang No 10 Tahun 2008 pada BAB VIII pasal 76 menyebutkan bahwa : Kampanye Pemilu dilakukan dengan prinsip bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat. Pada pasal 77 juga menyebutkan sebagai berikut:

1. Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye.
2. Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye.
3. Kampanye Pemilu didukung oleh petugas kampanye.

Jelaslah bahwa kampanye merupakan bagian dari proses yang dilaksanakan, diikuti dan didukung peserta kampanye pada Pemilu.

³ *Ibid.*

Kampanye politik juga merupakan bagian dari proses komunikasi publik.

Ada beberapa tipe tentang kampanye politik, tipe-tipe itu adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Perilaku Individu (" Individual Behavior Change). Tipe kampanye ini dapat disebut pula sebagai informasi publik atau kampanye pendidikan publik. Kampanye ini dilakukan untuk merubah perilaku publik yang digunakan untuk menjawab masalah-masalah sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat di mana individu itu berada.
2. Kampanye Keinginan Publik (" *Public will Campaigns*") Tipe kedua dari kampanye publik ini difokuskan pada penciptaan keinginan publik (*public will*), yang diharapkan dapat memotivasi perantara publik (*public officials*) untuk melaksanakan / menerapkan kebijakan publik yang diterbitkan atau membuat kebijakan baru yang setara dengan kepentingan publik.

Pelaksanaan kampanye publik tipe ini secara strategis diarahkan pada media *advocacy*, mengorganisir komunitas, dan memobilisasi kelompok masyarakat, dengan target *audience* adalah masyarakat umum dan pembuat keputusan (*General public and Policymakers*). Teori kampanye publik pada dasarnya memadukan komunikasi sosial dan komunikasi Psikologis, yang pada umumnya mengaplikasikan teori agenda setting, di mana mengatur apa yang diinginkan (*Grafitifications Sought*) dengan apa yang didapatkan (*Gratifications Obtains*) dengan menggunakan jaringan media dan jaringan canvas.⁴

Dengan demikian kampanye politik memunculkan pesan kepada khalayak bahwa sang kandidat layak untuk diberikan amanah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang berada di wilayah pilihannya. Pesan sering terdiri dari beberapa poin berbicara tentang isu-isu kebijakan. Poin-poin ini

⁴ [http://www.google.com/Komunikasi Politik,.187,html](http://www.google.com/Komunikasi_Politik,.187,html), diakses pada tanggal 02 Februari 2010 pukul 14.00 wib.

akan dirangkum dari ide utama dari kampanye dan sering diulang untuk menciptakan kesan abadi kepada pemilih.⁵ Dalam banyak pemilihan, para kandidat partai politik akan selalu mencoba untuk membuat para kandidat atau calon lain menjadi "tanpa pesan" berkaitan dengan kebijakannya atau berusaha untuk pengalihan pada pembicaraan yang tidak berkaitan dengan poin kebijakan atau program.

Sebagian besar strategis kampanye menjatuhkan kandidat atau calon lain yang lebih memilih untuk menyimpan pesan secara luas dalam rangka untuk menarik pemilih yang paling potensial. Sebuah pesan yang terlalu sempit akan dapat mengasingkan para kandidat atau calon dengan para pemilihnya atau dengan memperlambat dengan penjelasan rinci programnya.

Dengan demikian kampanye adalah upaya mempropagandakan kandidat caleg dan program-programnya dalam rangka menarik dukungan dan simpati masyarakat. Kampanye merupakan bagian penting dalam percaturan politik. Melalui kampanye, dari para kandidat presiden dapat memperkenalkan program-programnya, sekaligus dapat menarik simpati pemilih agar memberikan hak suara dan dukungan mereka kepada mereka. Dari pemahaman ini, kampanye memiliki kesamaan dengan dakwah. Oleh karena itu, pelaksanaan kampanye perlu diatur agar sesuai dengan Etika Islam, dan tidak menyimpang dari garis-garis yang ditetapkan Syari'at Islam. Allah SWT berfirman dalam surat An Nahl:125,

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ

⁵ DAN NIMMO, *Komunikasi Politik ; Komunikator, Pesan, dan Media* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2000), Cet-2, h. 193

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik”.

Pada Undang-undang No 10 Tahun 2008 pasal 84 disebutkan sebagai berikut :⁶

(1) Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang:

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. Mengganggu ketertiban umum;
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

Namun realisasinya pada kampanye pemilu 2009 yang lalu masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran seperti yang tersebut pada pasal 84 (1) huruf (c) yang menyebutkan bahwa dilarang menghina salah seorang kandidat peserta kampanye yang lain. Seperti pesan yang disampaikan oleh juru kampanye

⁶ Undang-undang No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Legislatif

tim sukses oleh salah seorang kandidat presiden di Sulawesi Selatan yang mengusung unsur sara.⁷

Kampanye yang diadakan pada pemilu lalu, juga dilaksanakan oleh partai-partai politik yang berada di Provinsi Riau. Sebanyak 48 partai politik yang ada di wilayah Provinsi Riau umumnya menyelenggarakan kegiatan kampanye politik yang telah dijadwalkan oleh KPU. Tidak terkecuali Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga turut serta dalam penyelenggaraan Kampanye politik tersebut.

Partai Keadilan Sejahtera yang pada awalnya bernama Partai Keadilan berdiri pada tanggal 20 Juli 1998 (atau 26 Rabi'ul Awwal 1419 H) di Jakarta. Merupakan sebuah partai yang berasaskan Islam yang menarik banyak simpatisan dari berbagai kalangan masyarakat di Indonesia. Bukan hanya itu, berbagai aksi solidaritas persaudaraan telah banyak digelar oleh partai ini. Maka bukanlah hal yang mengherankan jika pada awalnya partai ini mampu mendapatkan suara pada pemilu 1999 sebanyak 1,4 juta suara (7 kursi DPR, 26 kursi DPRD Propinsi dan 163 kursi DPRD Kota/Kabupaten).⁸

Pada pemilu 2009 yang telah lalu Partai Keadilan Sejahtera juga membuktikan diri sebagai partai yang masih eksis dalam perjalanan politiknya. Sebanyak 59 kursi (10,5%) di peroleh untuk Pemilu Anggota DPR periode 2009-2014, setelah mendapat sebanyak 8.206.955 suara (7,9%) dan menjadi satu-

⁷ Pernyataan Andi Malarangeng yang menyebutkan bahwa belum saatnya orang sulawesi menjadi presiden. Pesan itu disampaikannya pada kampanye pemilihan presiden di sela-sela orasinya di gor Andi Matalatta sulawesi selatan. Rabu (3/7/2009) sumber diperoleh dari harian Indonesia dengan mengakses situs www.okezone.com

⁸ <http://id.wikipedia.org/PKS>. Di akses pada tanggal 02 Februari 2010 Jam 13.00 WIB.

satunya partai - selain Demokrat - yang mengalami kenaikan jumlah perolehan suara.⁹

Partai yang mempunyai visi :” Sebagai partai da’wah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan ummat dan bangsa” ini. Dalam banyak pemberitaan di dalam surat kabar di Riau mampu memobilisasi massa yang begitu banyak pada kampanye seputar pemilu 2009 lalu. Seperti pembukaan kampanye di Gedung Politeknik Rumbai. Sebanyak 5000 massa menghadiri kampanye akbar tersebut.

Pada kampanye politik yang telah berlalu, panwaslu mencatat sebanyak tiga pelanggaran kampanye politik yang dilakukan oleh peserta kampanye. Pelanggaran yang dilakukan adalah memakai fasilitas negara, membawa anggota peserta kampanye yang belum mempunyai hak pilih, serta membawa calon dewan yang masih aktif. Padahal dalam UU No 10 Tahun 2008 pada pasal 84 jelas melarang penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Partai yang tercatat oleh panwaslu sebagai pelanggaran paling lengkap sepanjang kampanye terbuka pada pemilu yang telah berlalu adalah Partai Keadilan Sejahtera.

Berdasarkan paparan di atas penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang Realisasi Pasal 84 Tentang Kampanye Politik Partai Keadilan Sejahtera DPC Sail Tinjauan Menurut Fiqh Siyasah sehingga di dapatkan pemahaman yang tepat didalam memahami kampanye politik pada partai keadilan sejahtera dengan tinjauan fiqh siyasah.

⁹ *Ibid*

B. Batasan Masalah

Penulis dalam penulisan ini menerapkan batasan masalah berdasarkan latar belakang agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Penulis menetapkan bahwa dalam penulisan penelitian ini, penulis hanya merujuk kepada Pasal 84 UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu pada Pemilu 2009 pada kampanye politik di Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Sail.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah, maka permasalahan yang dapat penulis rumuskan dari penelitian kampanye politik ini adalah :

1. Bagaimana realisasi Pasal 84 Tentang kampanye politik Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu 2009?
2. Apa faktor yang menyebabkan Partai Keadilan Sejahtera melanggar aturan kampanye?
3. Bagaimana tinjauan kampanye politik menurut perspektif fiqh siyasah?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui realisasi kampanye politik dalam Pasal 84 Undang-undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu
- b. Untuk mengetahui penerapannya di Partai Keadilan Sejahtera Pekanbaru
- c. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah pada kampanye politik oleh partai keadilan sejahtera pada pemilu 2009.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya kampanye politik
- b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
- c. Salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Uin Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) yang berlokasi di DPC PKS Kecamatan Sail Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis memilih lokasi di kecamatan ini adalah karena permasalahan yang penulis teliti berada di lokasi ini.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah kader PKS yang berada di Kecamatan Sail serta Panwaslu, sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Realisasi Pasal 84 Tentang kampanye politik Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Sail Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah Pengurus dan kader PKS di Kecamatan Sail, karena jumlah kader tidak diketahui dan sulit untuk

diminta informasi, maka penulis mengambil 30 kader sebagai sampel yang ada di Kecamatan Sail dengan cara *Random Sampling* yaitu setiap populasi memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang di kumpulkan langsung dari lapangan yang diperoleh dari orang yang menjadi pengurus dan kader PKS. Kemudian menghubungkannya dengan masalah permasalahan yang diteliti.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang didapat melalui berbagai literature pustaka yang ada kaitannya dengan masalah yang di teliti, dan dari DPC PKS Kecamatan Sail.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab tentang permasalahan yang diteliti dengan pengurus DPC PKS Kecamatan Sail secara langsung untuk mendapatkan maklumat yang lebih mendalam untuk digunakan di dalam penelitian.
- b. Quesioner, yaitu penulis mengajukan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden dengan menyediakan alternatif jawabannya.
- c. Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh dari Panwaslu tentang pelanggaran Pemilu.

6. Metode Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta serta menyusun menjelaskan kemudian menganalisisnya untuk selanjutnya diambil kesimpulan.

- b. Induktif, yaitu dengan jalan mengumpulkan data-data yang bersifat khusus kemudian di analisa lalu di ambil kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Deduktif, yaitu dengan jalan mengumpulkan data-data yang bersifat umum yang ada kaitannya dengan penelitian ini, kemudian di analisa untuk sampai kepada kesimpulan yang bersifat khusus.

7. Metode Analisa

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa penelitian kualitatif yaitu setelah data terkumpul, data-data tersebut diklarifikasikan ke dalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut kemudian data tersebut dihubungkan antara satu dengan yang lainnya sehingga akhirnya diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Sebagai pola dasar bagi penulis demi terahnya dan untuk memudahkan pemahaman terhadap tulisan ini, penulis mengemukakan sistematika penulisan yang di bagi dalam lima bab yaitu :

Daftar Pustaka

Lampiran

- Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II Gambaran umum tentang lokasi penelitian, luas daerah,
- Bab III Realisasi kampanye politik, pengertian, kriteria dan kampanye politik, prespektif Fiqh Siyasah, ketentuan pasal 84 tentang larangan Kampanye politik
- Bab IV Realisasi Pasal 84 UU No 10 Tahun 2004 Tentang kampanye politik. partai keadilan sejahtera DPC Sail Tinjaun Menurut perspektif fiqh siyasah
- Bab V Kesimpulan dan Saran

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

DAN SELINTAS PKS SAIL

A. Geografis

1. Letak Kecamatan Sail

Kecamatan Sail merupakan salah satu dari Kecamatan yang berada di Kota Pekanbaru. Kecamatan Sail terdiri dari tiga desa yaitu :Cinta raja, sukamulya dan sukamaju. Kecamatan ini juga merupakan kecamatan yang berkembang baik dari segi pendidikan, perdagangan, perindustrian serta bentuk-bentuk kegiatan yang lainnya. Kecamatan sail ini terletak tepat berada pada posisi 101 14- 101 34 bujur utara dan 0 25 – 0 45 Lintang selatan.¹

2. Luas Daerah

Luas wilayah Kecamatan Sail berdasarkan Surat Pengantar yang di berikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Nomor 16 / 474.04 KS/ 12 / 2008 seluas 3,26 KM2. Luas ini merupakan jumlah dari keseluruhan masing-masing kelurahan yang berada di Kecamatan Sail.

¹ Pemerintahan Kota Pekanbaru, *Tata Pemerintahan Kota*,(Pekanbaru, 1998) h. 11

Tabel II. 1

Data Monografi Kelurahan Di Kecamatan Sail

NO	KELURAHAN	LUAS WILAYAH (KM.2)
1	CINTA RAJ 14	0,87
2	SUKAMULYA	1,21
3	SUKAMAJU	1,18
Jumlah		3,26

Sumber data : diambil dari Kantor Kecamatan Sail Tahun 2009

3. Batas Wilayah Kecamatan Sail

Dilihat dari daerah yang membatasi Kecamatan Sail, adalah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lima Puluh
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tenayan Raya
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pekanbaru Kota
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Raya

B. Demografis

Penduduk Kecamatan Sail dari tahun ke tahun selalu meningkat, di karenakan adanya pendatang dan tingginya tingkat kelahiran bayi.

Berdasarkan perhitungan jumlah penduduk sampai bulan Desember 2009, Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan Kepala Keluarga masing-masing Desa yang ada di Kecamatan Sail, dapat di lihat pada Tabel berikut ini :

Tabel II. 2

Jumlah Penduduk Kecamatan Sail

No	KELURAHAN	Jiwa	KK	Laki-laki	Perempuan
1	Cintaraja	6.775	1.755	3.397	3.378
2	Sukamulia	8.811	2.513	4.166	4.654
3	Sukamaju	7.012	1.475	3.692	3.320
	Jumlah	22.598	5.743	11.343	22.598

Sumber data : diambil dari Kantor Kecamatan Sail Tahun 2009

C. Sejarah Berdirinya DPC PKS Sail

Partai ini didirikan di Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 09 Jumadil ‘Ula 1423 H bertepatan dengan 20 April 2002 M, adalah kelanjutan Partai Keadilan yang didirikan di Jakarta pada hari Senin, tanggal 26 Rabi’ul Awwal 1419 H bertepatan dengan 20 Juli 1998 M.²

Struktur DPC PKS Kec.Sail dibentuk pada tanggal 4 Maret 2003 melalui rapat Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru.³

Kemudian melalui rapat bersama antara Pengurus Partai Keadilan dan Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru pada tanggal 21 Agustus 2003 menghasilkan peleburan kedua partai menjadi satu partai.

Pada tanggal 28 Agustus 2003 rapat Dewan Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru menghasilkan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Sail dengan mengangkat Muhammad Sabarudi sebagai ketua DPC.⁴

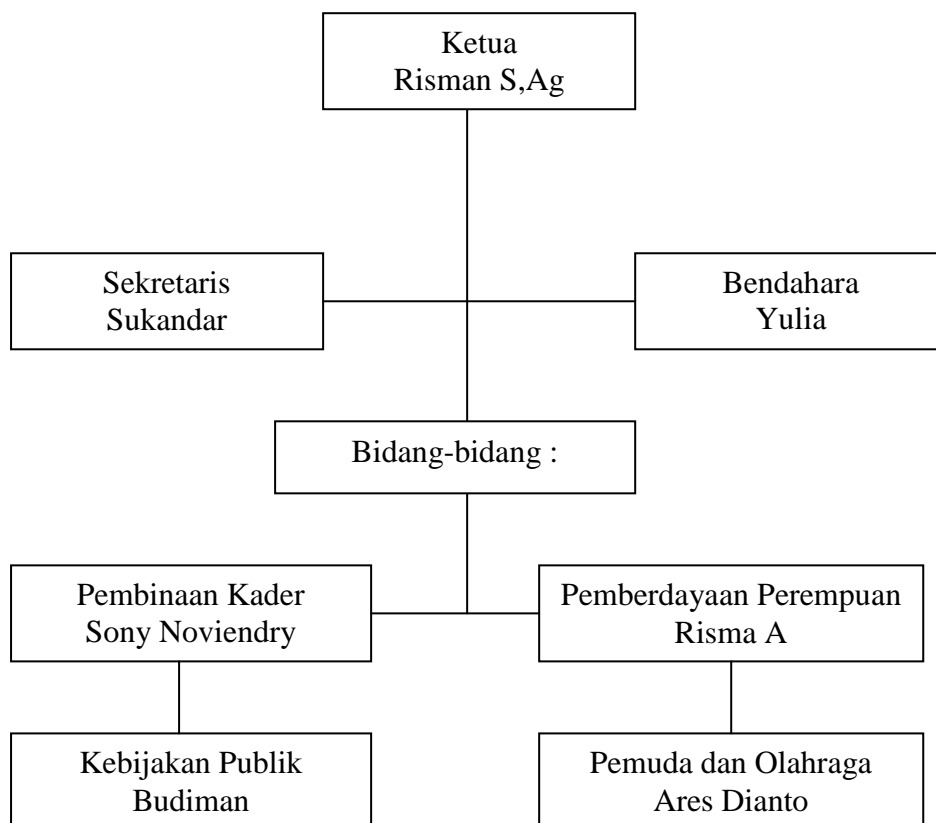
² Risman, (Ketua DPC PKS Sail), Wawancara, di Kecamatan Sail, 20 Januari 2010

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

Setelah beberapa kali digelar Musyawarah Cabang, pada hari Kamis, 28 Sya'ban 1430 H bertepatan 20 Agustus 2009 digelar Musyawarah Cabang Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Sail yang menghasilkan dipilihnya Risman, S.Ag sebagai ketua.⁵

D. Struktur Organisasi



⁵ Ibid.

Berhubungan dengan pembinaan dan kaderisasi

Contoh kegiatan:

- a. Pembinaan pekanan: Liqo/taklim/halaqah,
- b. Peningkatan keilmuan: Tasqif, Dauroh
- c. Ifthar jamai (buka puasa bersama)
- d. MABIT/malam bina iman dan taqwa (tauji dan shalat malam)
- e. Training Orientasi Partai (pengenalan partai kepada masyarakat)

Bidang Kebijakan Publik

Berhubungan dengan pembelajaran politik bagi masyarakat, Pengawasan/advokasi usulan warga kepada pemerintah, mempererat hubungan dengan masyarakat.

Contoh kegiatan:

- a. Silaturahmi kepada Tokoh Masyarakat
- b. Pelatihan Komunikasi Politik
- c. Bakti Sosial: pengobatan, fogging

Bidang Pemberdayaan Perempuan

Berhubungan dengan pembinaan, pelatihan ketrampilan perempuan.

Contoh kegiatan:

- a. Pelatihan Ketrampilan
- b. Seminar/penyuluhan
- c. Bakti Sosial Anak dan Manula

Bidang Pemuda dan Olahraga

Berhubungan dengan peningkatan kepemimpinan, olah fisik

Contoh kegiatan:

- a. Kepanduan: Mukhayam (perkemahan)

- b. Pelatihan Kepemimpinan
- c. Klub Olahraga: futsal, senam PKS Nusantara, tenis meja, renang, jogging

BAB III
TINJUAN TEORITIS
TENTANG KAMPANYE POLITIK

A. Pengertian Kampanye

Kampanye bersangkut paut dengan perilaku yang cukup dilembagakan. Perilaku itu cenderung sejalan dengan norma dan nilai yang ada. Kampanye seringkali menyangkut soal pengarahan, pemerkuatan dan penggerakan kecenderungan yang ada kearah tujuan yang diperkenankan secara sosial seperti pemungutan suara, pembelian barang-barang, pengumpulan dana peningkatan kesehatan dan keselamatan dan sebagainya.

Oleh karena itu cakupan bagi kemutakhiran dampak atau perubahan besar secara intrinsik seringkali terbatas dan media dimanfaatkan untuk membantu kekuatan lembaga lainnya. Tentunya hampir seluruh penelitian dan teori tentang kampanye yang tersedia bagi kita telah dilaksanakan dalam lingkungan seperti itu dan secara relatif sedikit banyaknya kita sudah mengetahui hal ikhwal kampanye, sepanjang keberadaannya, untuk mempromosikan tujuan yang tidak biasa atau baru.

Menurut Kotler dan Roberto Kampanye ialah sebuah upaya yang dikelola oleh suatu kelompok (agen perubahan) yang ditujukan untuk memersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu.¹

Sedangkan William Albig mendefinisikan komunikasi dalam berkampanye merupakan proses pengoperan lambang-lambang yang bernama antar individu” suatu lambang yang sama-sama dimengerti.²

¹ Cangara Hafield.” Komunikasi Politik ; *Konsep, Teori, dan Strategi* (Jakarta :Rajawali Pers 2009) Ed- 1, h. 284.

Pengoperan lambang tersebut berupa ide, pikiran, dan perasaan. Pikiran merupakan gagasan, info, pengetahuan dan sebagainya, sedangkan perasaan bisa berupa perasaan bahagia, sedih, marah, bingung, dan bimbang.

Kampanye menggunakan interaksi simbolis artinya pengoperan simbol-simbol atau lambang-lambang komunikasi yang mempunyai makna tertentu dalam berkampanye. Lambang komunikasi itu sendiri bisa berupa bahasa, baik tulisan maupun lisan, tanda, gambar-gambar, isyarat tertentu yang telah dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian sekaligus berpengaruh terhadap pesan yang disampaikan dan pada akhirnya akan menimbulkan efek atau hasil sesuai yang telah direncanakan oleh komunikator.³

Kampanye sebagai suatu kegiatan komunikasi yang didefinisikan oleh beberapa para ahli sebagai suatu kegiatan penyampaian informasi yang terencana, bertahap dan terkadang memuncak pada suatu saat yang mempengaruhi sikap, pendapat dan opini seseorang atau massa.⁴

Kampanye bersangkut paut dengan perilaku yang dilembagakan. Perilaku itu cenderung sejalan dengan nilai yang ada. Kampanye seringkali menyangkut soal pengarahan, pemerkuatan, dan penggerakan kecenderungan kearah tujuan yang diperkenankan secara sosial.

Kampanye merupakan salah satu metode komunikasi (persuasi), karena di sini juga membahas tentang upaya mempengaruhi massa, baik dalam tingkah laku maupun dalam bentuk opini.⁵

² *Ibid.*

³ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek*, Terj Tjun Surjaman (Bandung : Remaja Rosdakarya 2000) Cet-2., h,173

⁴ Santoso Sastropetro, *Propaganda Salah Satu Bentuk Komunikasi Massa*, (Bandung : Alumni 1991) Cet-4., h,118

⁵ Astrid s. Susanto, *Komunikasi Dalam Teori Dan Praktek*,(Jakarta : Binacipta, 1998) Cet-2, h.,16

Kondisi saringan menentukan struktur publik yang dijangkau dan keberhasilan kampanye akhirnya bergantung pada kesesuaian nalar antara komposisi publik target yang direncanakan dan publik yang terjangkau secara aktual. Akhirnya entri untuk dampak dalam model tersebut mengingatkan tentang banyaknya ragam kemungkinan dampak. Yang sebagian di antaranya diinginkan dan yang lain tidak, sebagian berjangka pendek dan sebagian lainnya berjangka panjang.

Keberhasilan atau keefektifan kampanye akan bergantung pada kecocokan antara dampak yang direncanakan dan dampak yang dihasilkan. Dengan demikian, kriteria keefektifan harus ditetapkan oleh pengirim tetapi evaluasinya juga perlu memperhitungkan dampak sampingan yang harus dibobotkan dalam keseluruhan keseimbangan. kampanye akhirnya harus berfungsi melalui individu-individu yang menerima dan menanggapi pesan dan karenanya banyak syarat dampak yang telah diuraikan juga berlaku bagi kampanye.

Setelah di paparkan pengertian kampanye, maka selanjutnya memaparkan politik. Dalam bahasa Indonesia, politik diartikan dengan :”segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan siyasad dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara atau negara lain, tipu muslihat atau pelicikan, dan juga dipergunakan, sebagaimana suatu disiplin ilmu politik”.⁶

Menurut Deliar Noer, pengertian politik adalah :”segala aktifitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat”.⁷

Menurut Meriam Budiarjo, pengertian politik adalah :”usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis”.⁸

⁶ W. S. S. Poerwadarwinta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1983) Cet-4, h. 753

⁷ Deliar Noer, *Pengantar Kepemikiran Politik*, (Jakarta : Rajawali Press, 1983), cet-1.,h.6.

Setelah penulis menjelaskan makna masing-masing kata, yaitu "kampanye" dan "politik", maka dapat diambil kesimpulan bahwa kampanye politik adalah suatu upaya yang terorganisir untuk mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya didalam pemilihan umum melalui pesan-pesan yang diterima oleh khalayak.

Dengan demikian kampanye politik memunculkan pesan kepada khalayak bahwa sang kandidat layak untuk diberikan amanah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang berada di wilayah pemilihannya. Pesan sering terdiri dari beberapa poin berbicara tentang isu-isu kebijakan. Poin-poin ini akan dirangkum dari ide utama dari kampanye dan sering diulang untuk menciptakan kesan abadi kepada pemilih. Dalam banyak pemilihan, para kandidat partai politik akan selalu mencoba untuk membuat para kandidat atau calon lain menjadi "tanpa pesan" berkaitan dengan kebijakannya atau berusaha untuk pengalihan pada pembicaraan yang tidak berkaitan dengan poin kebijakan atau program.

B. Langkah-langkah Kampanye

Dalam studi perencanaan komunikasi dikenal beberapa langkah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan sebuah kampanye. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam perencanaan komunikasi untuk kampanye, yaitu :

a. Penemuan dan penetapan masalah

Langkah pertama untuk melakukan suatu kegiatan kampanye harus dimulai dengan penemuan masalah. Tanpa menemukan masalah, kegiatan yang dilakukan bisa menjadi tindakan pemborosan, bahkan bekerja tanpa masalah bisa diibaratkan berjalan

⁸ Meriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008) ed, rev, cet-1., h. 13.

tanpa arah. Masalah adalah selisih antara harapan dan kenyataan, atau selisih antara aspirasi dan realitas.

b. Menetapkan Tujuan

Dengan mengetahui masalah, seorang perencana kampanye dapat menetapkan tujuan. Tujuan adalah suatu keadaan atau perubahan yang diinginkan sesudah pelaksanaan rencana. Kriteria penetapan tujuan yakni apa yang menjadi target, dan perubahan bagaimana yang diinginkan, yakni keluar sebagai pemenang dalam pemilu.

c. Penetapan Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani klasik yaitu *stratos* yang artinya tentara dan kata *agein* yang berarti memimpin. Dengan demikian, strategi dimaksudkan adalah memimpin tentara. Lalu muncul kata *strategos* yang artinya pemimpin tentara pada tingkat atas. Jadi, strategi adalah konsep militer yang bisa diartikan sebagai seni perang para jenderal (*the art the general*), atau suatu rancangan yang terbaik untuk memenangkan peperangan. Karl von Clausewitz merumuskan strategi sebagai “suatu seni yang menggunakan sarana pertempuran untuk mencapai tujuan perang”, sementara Marthin – Anderson merumuskan “strategi adalah seni yang melibatkan kemampuan inteligensi/pikiran untuk membawa semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dengan memperoleh keuntungan yang maksimal dan efisien.”⁹

Untuk menetapkan strategi, dapat digunakan model SWOT sebagai peralatan untuk menganalisis :

⁹ Cangara Hafield, *Komunikasi Politik ; Konsep, Teori, dan Strategi* (Jakarta :Rajawali Pers 2009) Ed- 1, h. 292

S = Strength – Kekuatan- kekuatan yang dimiliki partai

W = Weakness – Kelemahan-kelemahan yang ada pada partai

O = Opportunities – Peluang-peluang yang mungkin bisa diperoleh partai

T = Threats – Ancaman – ancaman yang bisa ditemui oleh partai.

Kekuatan yang dimiliki partai antara lain : besarnya jumlah pengurus wilayah, cabang dan ranting yang sudah diresmikan, jumlah anggota dan dari mana saja. Apakah partai sudah memiliki kantor dan kekuatan penggerak, misalnya dari kalangan pemuda, pengusaha, cerdik pandai. Dalam konteks kampanye, dipertanyakan bagaimana kekuatan media komunikasi yang sudah dimiliki, berapa banyak wartawan dan artis yang bisa menjadi mitra, berapa banyak juru kampanye (jurkam) yang sudah terlatih, berapa banyak tokoh masyarakat yang bisa digalang sebagai pengumpul suara dan semacamnya.¹⁰

Kelemahan-kelemahan yang dimiliki partai juga harus dianalisis untuk dicari solusi penyelesaian agar tidak menjadi factor yang bisa menyebabkan kekalahan dalam pemilu. Kelemahan yang harus dianalisis antara lain kebalikan dari kekuatan yang dimiliki misalnya beberapa pengurus wilayah, cabang atau anak cabang yang belum diresmikan, jumlah anggota yang masih relative rendah dan belum adanya kekuatan dana yang memadai untuk mendukung operasional kampanye, dan lain sebagainya.¹¹

Peluang atau kesempatan yang bisa diperoleh untuk mendukung kampanye harus dianalisis, misalnya adanya kader yang menduduki jabatan penting, baik di sektor swasta maupun di bidang pemerintahan dan legislatif yang bisa memberi dukungan dana. Adanya pihak luar yang ingin memberi bantuan berupa pinjaman kendaraan selama

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

kampanye, pemberian simbol-simbol partai dalam kampanye, misalnya bendera, kaos oblong, topi, pin, dan lain sebagainya.¹²

Ancaman adalah faktor terakhir yang harus dianalisis untuk sebuah kampanye. Misalnya ancaman untuk menurunkan spanduk partai yang sudah terpasang, tekanan untuk tidak memberi suara pada pemilu, *money politics*, tidak boleh berkampanye dalam kawasan yang sudah dikapling partai lawan, kekurangan dana, pelarian kader yang tidak loyal, kebocoran strategi dan lain sebagainya. Analisis kekuatan dan kelemahan partai berada dalam ranah internal partai, sedangkan analisis untuk peluang dan ancaman menjadi ranah eksternal partai. Kedua ranah ini saling mendukung dalam eksistensi dan keberhasilan perjuangan partai.¹³

d. Penetapan Juru Kampanye

Dalam berbagai kajian komunikasi, komunikator menjadi sumber dan kendali semua aktivitas komunikasi. Oleh karena itu, jika suatu proses kampanye tidak berhasil dengan baik, kesalahan utama bersumber dari komunikator (juru kampanye) karena komunikatorlah yang tidak memahami penyusunan pesan, memilih media yang tepat, dan mendekati khalayak yang menjadi target sasaran. Sebagai pelaku utama dalam aktivitas komunikasi, komunikator memegang peranan yang sangat penting. Untuk itu, seorang komunikator yang akan bertindak sebagai juru kampanye harus terampil berkomunikasi, kaya ide, serta penuh daya kreativitas.

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi seorang juru kampanye, yakni (1) tingkat kepercayaan orang lain kepada dirinya (kredibilitas); (2) daya tarik (attractive); (3) kekuatan (power).

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

e. Penetapan Target Sasaran

Dalam dunia bisnis masyarakat biasanya diistilahkan dengan sebutan pasar. Dalam studi komunikasi disebut khalayak (audience), sementara dalam dunia politik disebut publik. Memahami masyarakat, terutama yang akan menjadi target sasaran dalam kampanye, merupakan hal yang sangat penting sebab bagaimanapun besarnya biaya, waktu, dan tenaga yang dikeluarkan untuk memengaruhi mereka, namun jika mereka tidak mau memberi suara kepada partai atau calon yang diperkenalkan kepada mereka, kampanye akan sia-sia.

Mengenai sifat, karakteristik dan keinginan masyarakat yang menjadi target sasaran kampanye, dapat dilihat dari tiga aspek, yakni : aspek sosiodemografik; aspek profil psikologis; aspek perilaku masyarakat. Untuk membuat peta tentang target sasaran (khalayak), kotler mengajukan enam hal yang perlu dipetakan, yakni : demografi; kondisi ekonomi; kondisi fisik misalnya lokasi, perumahan dan jalan raya; teknologi yang tersedia, misalnya jaringan telekomunikasi, mobilitas transportasi; partai politik yang dianut masyarakat; dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

f. Menyusun pesan-pesan kampanye

Pesan adalah segala sesuatu yang disampaikan oleh seseorang dalam bentuk simbol yang dipersepsi dan diterima khalayak dalam serangkaian makna. Kemampuan manusia menciptakan simbol membuktikan bahwa manusia sudah memiliki kebudayaan yang tinggi dalam berkomunikasi mulai dari simbol sederhana seperti bunyi, isyarat, dan warna sampai pada simbol-simbol yang dimodifikasi dalam bentuk sinyal-sinyal melalui gelombang udara dan cahaya, seperti radio, televisi, telegram, telex, dan satelit. Simbol

adalah hasil kreasi manusia yang mengandung makna sehingga bisa digunakan dalam berkomunikasi antarsesama manusia.

Menurut bentuknya, simbol yang disampaikan dapat dibedakan atas dua macam, yakni simbol verbal dan simbol nonverbal. Simbol verbal dalam pemakaiannya menggunakan bahasa. Bahasa dapat didefinisikan sebagai seperangkat kata yang telah disusun secara berstruktur sehingga menjadi himpunan kalimat yang menjadi arti. Simbol nonverbal biasa disebut bahasa isyarat, bahasa tubuh (*body language*), atau bahasa diam (*silent language*).¹⁴

Menurut sifatnya, pesan dapat dibedakan atas dua macam, yakni pesan yang bersifat informatif dan pesan yang bersifat persuasi. Pesan yang bersifat informasi dapat dibedakan atas dua macam, yakni informasi yang bersifat aktual dan informasi yang bersifat umum. Informasi aktual ditandai dengan kebaruan atas kejadian informasi tersebut. Sedangkan informasi yang bersifat umum digolongkan dalam kategori publikasi.

Pesan yang bersifat persuasi memiliki sebuah proposisi, yakni adanya hasil yang diperoleh sumber dari penerima atas pesan yang disampaikannya. Artinya, setiap pesan yang dibuat diharapkan akan menghasilkan perubahan. Kampanye berusaha mengubah pengetahuan, sikap, tingkah laku seseorang atau publik terhadap kandidat atau partai yang diperkenalkannya.¹⁵

¹⁴ Santoso Sastropetro: *Propaganda Salah satu Bentuk Komunikasi Massa* (Bandung : Alumni 1991), Cet-4., h, 120

¹⁵ *Ibid.*, h. 125

Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam penyusunan pesan yang memakai teknik persuasi, antara lain : *Fear appeal*, *Emotional appeal*, *Reward appeal*, *Motivational appeal*, *Humorous appeal*.¹⁶

Pesan yang menakutkan (*fear appeal*) ialah metode penyusunan pesan yang dapat menimbulkan rasa ketakutan kepada khalayak. Dalam konteks politik pesan yang menakutkan banyak dilakukan pada masa pemerintahan orde baru, terutama yang ditujukan kepada masyarakat yang tinggal di pedesaan untuk memilih salah satu partai kontestan melalui peranan kepala-kepala desa.

Pesan yang penuh dengan emosi (*emotional appeal*) ialah cara penyusunan pesan yang berusaha menggugah emosi khalayak, misalnya dengan mengungkapkan masalah agama, etnis, kesenjangan ekonomi, diskriminasi dan lain sebagainya.

Pesan yang penuh dengan janji-janji (*reward appeal*), ialah cara penyusunan pesan yang berisi janji-janji kepada khalayak. Di Indonesia metode penyampaian pesan dengan janji-janji telah banyak dilakukan dengan berhasil. Misalnya janji naik haji bagi petani yang sukses atau pemberian beasiswa bagi peserta keluarga berencana yang memiliki dua orang anak.¹⁷

Penyusunan pesan yang penuh dorongan (*motivational appeal*) ialah teknik penyusunan pesan yang dibuat karena janji-janji, tapi disusun untuk menumbuhkan pengaruh internal psikologis khalayak sehingga mereka dapat mengikuti pesan-pesan yang disampaikan itu. Misalnya menumbuhkan rasa nasionalisme atau gerakan memakai produksi dalam negeri.

¹⁶ Hangara hafiield. *op.,cit.* h. 298

¹⁷ Hangara Hafield. *op., cit* . h. 301

Penyusunan pesan penuh humor (*humorous appeal*) ialah teknik penyusunan pesan yang berusaha membawa khalayak tidak merasa jenuh. Pesan yang disertai rasa humor mudah diterima, enak, dan menyegarkan.

C. Pengaruh Kampanye

Pengaruh atau efek ialah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh bisa terjadi dalam bentuk perubahan pengetahuan. (*knowledge*), sikap (*attitude*) dan perilaku (*behavior*). Pada tingkat pengetahuan pengaruh bisa terjadi dalam bentuk perubahan persepsi dan perubahan pendapat (*opinion*). Adapun yang dimaksud dengan perubahan sikap ialah adanya perubahan internal pada diri seseorang yang dikelola dalam bentuk prinsip sebagai hasil evaluasi yang dilakukannya terhadap objek.¹⁸

Dalam banyak hal, terutama yang berkaitan dengan kepercayaan atau ideologi, orang berubah sikap karena melihat bahwa apa yang tadinya tidak benar. Oleh karena itu, ia berubah sikap untuk mengganti kepercayaan itu. Sementara itu, yang dimaksud dengan perubahan perilaku ialah perubahan yang terjadi dalam bentuk tindakan.

Menurut Dan Nimmo bahwa kampanye dilakukan untuk membuat perbedaan, terutama bagi orang-orang yang bersikap independen dan belum punya pilihan, dapat berubah sikap dan perilakunya setelah melihat citra calon-calon yang bertarung. Nimmo lebih jauh melihat bahwa kampanye politik merupakan sebuah proses komunikasi. Di mana pemilih tidak serta merta merespons isu-isu kampanye tersebut, melainkan melalui proses pembentukan (*construct*) pandangan mereka sehingga melalui kampanye akan tiba pada suatu keputusan setelah menginterpretasikan simbol-simbol kampanye yang menerpa diri mereka sesuai dengan pengalaman yang mereka miliki.¹⁹

Dari konteks komunikasi politik, keberhasilan sebuah kampanye politik sekurang-kurangnya ditentukan oleh empat faktor, yakni :

¹⁸ DAN NIMMO, *Komunikasi Politik : Komunikator, Pesan, dan Media* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2000), h. 193

¹⁹ *Ibid*, h. 195

a. Partai politik

Peranan partai politik sangat besar pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan seseorang dalam menentukan pilihannya. Partai besar dengan modal anggota dan simpatisan banyak, sejarah kelahiran yang sudah sangat lama, memiliki tokoh-tokoh nasional yang kompeten, dan kepengurusan yang hampir menyebar di semua provinsi dan kabupaten, memiliki pengaruh yang besar dibanding partai kecil yang digolongkan sebagai partai gurem.

b. Media massa

Menjelang pemilu, masyarakat dibombardir informasi politik melalui berbagai macam media promosi, mulai dari tv, radio, surat kabar, tabloid, majalah, bulletin, kalender, stiker, payung, tas, kaos oblong, buku, bendera, baliho, spanduk, dan lain sebagainya. Walaupun ada kesangsian bahwa penggunaan media massa sebagai kampanye kurang berpengaruh terhadap pemilih, namun media massa mampu sebagai alat untuk mempengaruhi massa dengan menampilkan citra dari kandidat yang akan dipilih dalam pemilu tersebut.

c. Kapabilitas individu

Mendapatkan kader partai yang memiliki kapabilitas untuk dijadikan sebagai tokoh tidak mudah sebab kapabilitas adalah kemampuan seseorang untuk mampu menarik simpati orang lain dan menaruh kepercayaan sehingga ia memilihnya. Kapabilitas tidak datang begitu saja, melainkan hanya bisa diperoleh dari berbagai faktor, antara lain : pengetahuan, keterampilan berkomunikasi, kepribadian dan hubungan kemanusiaan, dan kepemimpinan.

d. Kebijakan dan program

Pengaruh juga ditentukan isi kampanye. Dalam praktik kampanye politik, isi kampanye biasanya dikaitkan dengan platform partai. Jika platform atau program kerja itu dinilai memiliki perspektif yang baik sudah tentu akan memengaruhi pemilih. Akan tetapi, jika hal itu dinilai tidak menyentuh kebutuhan ia akan ditinggalkan.

D. Kampanye dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Karena dalam masa kehidupan Rasulullah saw tidak pernah ada Pemilihan Umum (Pemilu) seperti hari ini maka otomatis tidak ada pula kampanye seperti sekarang. Ini bermakna tidak ada rujukan langsung tentang kampanye dalam Islam sebagaimana kampanye yang berlangsung hari ini. Namun Islam punya istilah lain untuk mengembangkan Islam dan ummatnya yang disebut dakwah. Antara dakwah dengan kampanye tentunya mempunyai perbedaan yang sangat signifikan, karena istilah dakwah itu konotasi positif dan dekat dengan pahala sementara kampanye bernuansa negatif yang cenderung dikonotasikan akrab

dengan neraka. Ini lebih disebabkan oleh kecenderungan-kecenderungan jurkam yang suka berbohong dan inkar janji selama ini.

Jika dilihat dari pengertiannya, antara dakwah dan kampanye mempunyai persamaan. Dakwah berasal dari bahasa Arab *da'a, yad'u, da'watan* yang berarti panggilan, ajakan atau seruan. Sedangkan dakwah menurut istilahnya mengandung beberapa arti yang beraneka ragam, banyak ahli ilmu dakwah memberikan pengertian atau definisi terhadap istilah dakwah terdapat sudut pandang mereka di dalam memberikan pengertian pada istilah tersebut, sehingga antara definisi menurut ahli yang satu dengan lainnya senantiasa terdapat perbedaan dan kesamaan.

Menurut Hamzah Yaqub dalam memberikan pengertian dakwah dalam Islam ialah mengajak umat manusia dengan hikmah kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya.²⁰

Dalam al-Qur'an surat an Nahl ayat 125 disebutkan bahwa dakwah adalah mengajak umat manusia ke dalam kebaikan.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk".(QS. an-Nahl : 125)²¹

Pengertian dari dakwah sendiri adalah upaya paling efektif dalam rangka menyebarkan agama Islam, karena melalui kegiatan dakwah seluruh pesan-pesan syari'at disampaikan kepada manusia. Sedangkan menurut arti istilahnya dakwah memiliki beberapa

²⁰ Asmuni Syukir, *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam* (Surabaya : Al-Ikhas) h, 19

²¹ *Ibid.*

makna yang beragam, hal ini tergantung pada sudut pandang mereka dalam memberikan pengertian pada istilah dakwah tersebut. Meskipun demikian secara umum dapat dikemukakan bahwa; dakwah pada hakekatnya adalah ajakan kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar, yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

Dakwah atau ajakan yang semacam ini telah ada semenjak manusia ada di muka bumi. Jika dikaitkan dengan dakwah Islam, maka itu termasuk kategori “*amar al-makruf wa nahi al munkar*”. Oleh karena itu apapun yang mengajak kepada kebaikan dan kebenaran serta dinamakan dengan dakwah.²²

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa kampanye adalah upaya mempropagandakan partai dan program-programnya dalam rangka menarik dukungan dan simpati masyarakat. Kampanye merupakan bagian penting dalam percaturan politik. Melalui kampanye, suatu partai dapat memperkenalkan program-programnya, sekaligus dapat menarik simpati pemilih agar memberikan hak suara dan dukungan mereka kepada partai tersebut.

Dari pemahaman diatas, kampanye memiliki kesamaan dengan dakwah. Oleh karena itu, pelaksanaan kampanye perlu diatur agar sesuai dengan etika Islam, dan tidak menyimpang dari garis-garis yang ditetapkan Syari'at Islam. Terutama bagi partai-partai yang menyatakan dirinya Partai Islam atau Partai yang berasaskan Islam.

Bagi Partai Keadilan Sejahtera, yang mengikrarkan dirinya sebagai Partai Dakwah, berkampanye harus sesuai dengan adab-adab Islam, di antaranya:²³

1. *Ikhlaash* (Keikhlasan)

²² Toha Yahya Omar, *Islam dan Dakwah*, (Jakarta : PT. al-mawardi Prima 2004), Cet-1 h, 68

²³ [www.pk-sejahtera.org/v2/main.php?op=isi&id=6335&kunci=etika kampanye](http://www.pk-sejahtera.org/v2/main.php?op=isi&id=6335&kunci=etika_kampanye). Diakses pada jam 13-00 tanggal 31 April 2010

Kampanye dalam Islam merupakan bagian dari amal shaleh dan ibadah, maka dari itu perlu diperhatikan keikhlasan niat dan ketulusan motivasi setiap hati nurani para penyelenggara, peserta terutama da'i dan juru kampanye. Agar kampanye yang dilakukan tidak hanya berdampak pada masalah-masalah keduniaan, tetapi juga mendapat keridhaan dan keberkahan Allah SWT. Pada saat kampanye, faktor-faktor yang merusak keikhlasan harus di jauhi arogansi atau kesombongan yang disebabkan oleh banyaknya pengikut atau kelebihan lain, juga harus dihindari.

2. *Tha'ah* (Keta'atan)

Pada saat kampanye, terkadang larut dalam berbagai acara dan pembicaraan yang membuat lupa atau mengabaikan keta'atan kepada Allah, seperti kewajiban shalat. Bagi seorang muslim, saat berkampanye jangan sampai mengabaikan keta'atan kepada Allah apalagi sampai kepada tingkat melalaikan diri dan orang lain dari jalan Allah. Demikian halnya dengan keta'atan kepada aturan yang berlaku, dan arahan partai yang berkenaan dengan kampanye sebagai bentuk ketaatan kepada ulil amri, hendaknya diperhatikan.

3. *Uswah* (Keteladanan)

Di antara etika kampanye yang terbaik dan simpatik adalah mengedepankan keunggulan partai yang bersangkutan, tanpa perlu menjelekkkan dan mengejek orang, partai atau golongan lain seperti black campaign. Partai yang baik dan program yang bagus juga harus disampaikan dengan cara yang bagus dan professional. Di antara kampanye yang efektif adalah dengan cara memberi keteladanan yang terbaik. Bahasa

perilaku sering lebih efektif daripada bahasa lisan. Kampanye adalah memikat dan menarik simpati orang.

4. *Shidq* (Kejujuran)

Jujur, Tidak Berdusta Atau Berbohong Atau Mengumbar Janji Kejujuran merupakan salah satu kunci sukses berkomunikasi politik. Berbagai kebaikan akan menyertai kapan, dimana, dan siapa saja yang komitmen dengan kejujuran. Kampanye tidak boleh menghalalkan segala cara. Tujuan luhur tidak boleh dirusak oleh cara yang kotor. Berbohong adalah perbuatan terlarang dalam Islam, apalagi yang dibohongi itu orang banyak, sudah tentu bahayanya lebih berat. Berbohong adalah menyampaikan sesuatu yang Tidak Sesuai Dengan Keadaan sebenarnya.

Kondisi yang tidak terkendali, juga bisa mengakibatkan seseorang larut dalam perilaku dan orasi yang cenderung mengumbar janji muluk yang tidak mungkin dilaksanakan. Hal ini harus diperhatikan oleh seorang da'i atau juru kampanye. Janji pasti akan dipertanggung-jawabkan di Akhirat.

5. *Ukhuwwah* (Persaudaraan)

Kampanye bukanlah arena untuk memuaskan selera dan hawa nafsu. Perkataan yang diucapkan dan sikap yang ditampilkan harus senantiasa mencerminkan rasa ukhuwah Islamiyah. Tidak boleh berprasangka buruk apalagi melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan, karena hal itu akan menimbulkan kerenggangan dan perseteruan yang mengganggu ukhuwah. Dalam kampanye juga tidak dibolehkan

mengeluarkan kata-kata yang melukai harga diri dan martabat seseorang atau lembaga yang dihormati oleh

6. *Tarbawy* (Edukatif)

Kampanye adalah salah satu sarana pendidikan politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kesantunan, di samping sebagai sarana da'wah yang memiliki makna mengajak dengan cara persuasif, tidak memaksa atau mengintimidasi. Dalam kampanye tidak boleh memaksa dan memaksakan kehendak kepada orang lain. Termasuk mempengaruhi Dan Mempolitisir Supaya menerima dan memberikan hak pilihnya kepada partai tertentu dengan berbagai cara yang bersifat memaksa atau terpaksa, seperti dengan cara politik uang.

Dengan demikian, kampanye edukatif ini menuntut setiap partai dan juru kampanye atau da'i agar lebih inovatif, kreatif, dan proaktif. Massa pemilih mempunyai hak dan kebebasan memilih suatu partai sesuai dengan pilihan hati nurani. Sebagaimana dalam memeluk agama, manusia diberikan hak untuk beragama Sesuai keyakinannya, apalagi dalam hal berpartai.

Saat kampanye, juga harus diperhatikan hak orang lain terutama hak jalan. Jika kampanye menggunakan cara pengerahan masa dan sejenisnya, maka harus dilakukan secara tertib dan terkendali. Hak pengguna jalan harus diberikan dan dilarang merusak atribut Partai lain.

Demikian pula dengan acara atau hiburan yang tidak mendidik bahkan cenderung tidak moral. Karenanya harus dihindari hiburan yang menampilkan unsur pornografi-pornoaksi dan hal-hal yang dilarang oleh agama, aturan maupun adat.

7. *Tawadlu'* (Rendah Hati).

Akhlak Islam mengharuskan agar suatu partai tidak menganggap dirinya paling baik apalagi paling benar, misalkan anggapan partainya lah yang paling Islami, sedang orang lain dan partai lain tidak ada yang benar. Juga tidak mudah menuduh kalangan lain melakukan suatu kesesatan atau perbuatan bid'ah. Cara ini bukan cara yang Islami. Menyampaikan keunggulan sendiri boleh saja, tetapi tidak harus mengklaim apalagi menyombongkan Diri Sebagai yang terbaik atau paling Islami.

Mengakui keterbatasan diri sebagai manusia dan keterbatasan partai sebagai kumpulankomunitas manusia adalah bagian dari sifat rendah hati yang disukai siapapun. Selanjutnya menggantungkan rencana dan program pada Allah SWT. Tujuan berpolitik dalam Islam tidak lain adalah mencari ridha-Nya.

8. *Ishlah* (Perbaikan)

Kampanye hendaknya dapat memberi kemaslahatan bagi bangsa baik material maupun spiritual, dan menghindari kampanye yang tidak berguna, sia-sia, apalagi

menimbulkan dosa. Dalam hal pembuatan spanduk, stiker, atau perangkat kampanye lain, juga harus memuat pesan yang baik bagi masyarakat.

Kampanye yang mengarah langsung pada *problem solving* (pemecahan masalah) yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, seperti menggagas penyelamatan bangsa, shilaturahmi, aksi-aksi kepedulian sosial, advokasi, penyuluhan hukum, dan ceramah agama, lebih baik dari hanya sekedar slogan kosong.

E. Ketentuan Pasal 84 Tentang Kampanye Pemilu

Di dalam tata pemerintah disebutkan bahwa dalam membuat rancangan undang-undang Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden di dalam rapat paripurna. Pembahasan rancangan perundang-undang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Bersama Presiden Republik Indonesia. Mengenai pembahasan rancangan undang-undang dilakukan melalui empat tingkat pembicaraan:²⁴

1. Pembicaraan tahap pertama meliputi:
 - a. Penjelasan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat mengenai rancangan undang-undang yang berasal dari kepala pemerintah, disampaikan dalam rapat paripurna DPR.
 - b. Penjelasan pimpinan komisi/gabungan komisi atau panitia khusus atas nama DPR mengenai rancangan undang-undang yang berasal dari usul prakarsa DPR.
2. Pembicaraan tahap kedua meliputi:
 - a. Rancangan undang-undang berasal dari kepala pemerintah.
 - b. Pandangan umum anggota yang membawakan fraksinya.

²⁴ Faried Ali, *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997) Ed-1, Cet-2, h, 217

- c. Nota komisi yang membuat pendapat yang lebih rinci atas undang-undang yang diajukan oleh Presiden pada pembicaraan tahap pertama.
 - d. Jawaban Presiden terhadap pandangan umum anggota dan nota komisi.
 - e. Jika jawaban Presiden belum memuaskan, maka pandangan umum anggota dapat dilakukan kembali.
 - f. Presiden menjawab kembali terhadap pandangan umum anggota dan nota komisi
3. Pembicaraan tahap ketiga meliputi:
- a. Rapat bersama antar komisi/gabungan komisi/pansus/dengan pejabat yang ditunjuk presiden guna membahas dan menyempurnakan rancangan undang-undang yang sedang dibahas.
 - b. Laporan pimpinan komisi/gabungan komisi pansus tentang hasil rapat disampaikan pada rapat paripurna.
4. Pembicaraan tahap keempat meliputi:
- a. Penyampaian pendapat akhir fraksi oleh juru bicara fraksi masing-masing.
 - b. Pengambilan keputusan untuk menetapkan rancangan peraturan daerah yang telah dibahas/disetujui menjadi peraturan.
 - c. Sambutan Presiden terhadap pengambilan keputusan.

Menurut pasal 84 undang-undang no 10 tahun 2008 pada bagian ketiga dari bab VIII menyebutkan tentang larangan dalam kampanye pemilu, yang berbunyi sebagai berikut :²⁵

(1) Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang:

²⁵ Undang-undang No 10 Tahun 2008 Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, (Jakarta : Tamita Utama, 2008) h, 54

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. Mengganggu ketertiban umum;
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

(2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikut sertakan:

- a. Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur Bank Indonesia;
- d. Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;

- e. pegawai negeri sipil;
- f. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Kepala desa;
- h. Perangkat desa;
- i. Anggota badan permusyawaratan desa; dan
- j. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

(3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i dilarang ikut serta sebagai pelaksana kampanye.

(4) Sebagai peserta kampanye, pegawai negeri sipil dilarang menggunakan atribut partai atau atribut pegawai negeri sipil.

(5) Sebagai peserta kampanye, pegawai negeri sipil dilarang mengerahkan pegawai negeri sipil di lingkungan kerjanya dan dilarang menggunakan fasilitas negara.

(6) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, ayat (2), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu.

BAB IV
PRESPEKTIF FIQH SIYASAH TERHADAP REALISASI
PASAL 84 TENTANG KAMPANYE POLITIK DI DPC PKS
PK SEJAHTERA

A. Realisasi Pasal 84 Tentang Kampanye Politik di DPC PKS Sail

Kampanye politik merupakan sebuah bentuk upaya untuk mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya. Dalam pemilu kampanye diatur dalam undang-undang supaya tidak terjadi kekacauan dalam pelaksanaannya. Merujuk kepada undang-undang, pada pemilu diberlakukan undang-undang no 10 tahun 2008. Undang- undang ini berlaku dalam hal pelaksanaan dan pengawasan dalam pemilu umumnya dan kampanye khususnya.

Kampanye dalam pemilu, menurut pasal 77 menyebutkan bahwa kampanye pemilu dilakukan dengan prinsip bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.¹ Artinya setiap tindakan yang dilakukan oleh peserta dan penyelenggara kampanye, dilakukan dengan bertanggung jawab. Jika terjadi sesuatu hal yang dilakukan menyalahi dari aturan yang berlaku, setiap pelaksana dan penyelenggara akan ditindak lanjuti menurut ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, kampanye pemilu diawasi oleh suatu badan yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemilu pada setiap pelaksanaannya. Badan tersebut disebutkan dalam pasal 1 ayat 15, 16 dan 17 pada bab I ketentuan umum, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan I⁴⁷ di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹ *Ibid.*

2. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
3. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu kabupaten/kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.²

Pada pemilu 2009 yang lalu, kampanye politik yang diadakan oleh sebagian besar peserta pemilu (partai-partai politik peserta pemilu) terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam hal berkampanye. Menurut Kastulani terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye berlangsung di wilayah kota pekanbaru, yaitu sebagai berikut :

- a. Menggunakan fasilitas pemerintah
- b. Menggunakan sekolah, mesjid sebagai tempat berkampanye
- c. Membawa serta peserta kampanye yang tidak mempunyai hak pilih
- d. Berkampanye lebih awal dari jadwal yang telah ditetapkan.³

Masing-masing dari peserta kampanye melakukan pelanggaran ini semasa kampanye pemilu 2009 yang lalu. Pelanggaran-pelanggaran yang telah disebutkan diatas, telah dilakukan tindakan lebih lanjut oleh Panwaslu.⁴

Pemilu yang lalu juga diikuti oleh Partai Keadilan Sejahtera baik pada tingkat wilayah, daerah dan cabang. Masing-masing melakukan kampanye politik. Pelanggaran terhadap kampanye politik juga dilakukan oleh partai ini, merujuk kepada pasal 84 ayat 1

² *Ibid*

³ Muhammad Kastulani (Ketua Panwaslu Kota Pekanbaru), *wawancara, di Tampan*, 20 Maret 2010

⁴ *Ibid*

huruf (f) undang-undang no 10 tahun 2008 bab VIII yaitu:”menggunakan tempat ibadah, sekolah untuk berkampanye”.⁵

Penyelenggaraan kampanye pemilu yang telah dilakukan oleh partai keadilan sejahtera yang lalu, pada tingkat daerah, ditemukan beberapa pelanggaran. Menurut panwaslu pelanggaran itu terjadi pada saat kampanye akbar yang dilakukan oleh PKS di lapangan PCR Rumbai.

Panwaslu menemukan bahwa pada saat kampanye berlangsung paling tidak, beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh PKS adalah sebagai berikut:

1. Membawa peserta kampanye yang tidak mempunyai hak pilih
2. Menggunakan fasilitas umum
3. Kampanye diluar jadwal

Jika merujuk kepada undang-undang No 10 tahun 2008 pada Bab VIII pasal 84 ayat 1 huruf (e), huruf (h) dan ayat 2 huruf (j). Jelaslah bahwa Partai keadilan sejahtera melakukan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Padahal pada pasal 77 jelas di sebutkan bahwa kampanye diselenggarakan sebagai bentuk dari pendidikan politik bagi masyarakat.

Tidak jauh berbeda, pada tingkat kecamatan, pada tingkat ini juga terdapat pelanggaran. Menurut Pengawas pemilu kecamatan pada penyelenggaraan kampanye pada pemilu yang telah berlalu. Setidaknya, pks cabang sail juga melakukan tindakan yang sama pada setiap kampanye.⁶ Sependapat dengan panwaslu kecamatan, ketua dewan pengurus cabang juga mengakui hal itu.⁷

Kampanye pemilu merupakan salah satu upaya dari partai untuk memenangkan pemilu. Juga merupakan tindakan untuk merebut simpati pemilih berdasarkan pencitraan

⁵ Undang-undang No 10 Tahun 2008, *op., cit.*

⁶ Dasril (Ketua Panwaslu Kecamatan), *wawancara*, di Kecamatan Sail, 23 Februari 2010

⁷ Risman (Ketua DPC PKS Sail), *wawancara*, di Kecamatan Sail, 25 Februari 2010

terhadap masing-masing calon legislative baik itu pada daerah, provinsi, maupun nasional. Jika dilihat dari table, dari 30 orang responden. Mereka yang pernah mengikuti kampanye politik. Bahkan 100 % dari mereka pernah mengikuti kampanye politik.

Table IV. 1

Tanggapan Responden Yang Pernah Mengikuti Kampanye Politik

Tanggapan Responden	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Pernah	30	100 %
Tidak Pernah	-	-
Tidak Tahu	-	-
Jumlah	30	100 %

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa 30 orang atau 100 % menjawab bahwa mereka pernah mengikuti kampanye politik. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pada dewan pengurus cabang PKS pernah mengikuti kampanye politik. Menurut Sukandar "kampanye pemilu, merupakan awal langkah untuk memenangkan pemilu dengan cara berkampanye". Lebih lanjut, beliau menegaskan "sah-sah saja kader mengikuti kampanye, selama tidak melanggar dari ketentuan yang berlaku."⁸

Kampanye pemilu juga dapat dilakukan melalui pertemuan terbatas, tatap muka dan rapat umum. Seperti yang terlihat dari table di bawah ini :

Table VI. 2

Tanggapan Responden Mengikuti Kampanye di Pertemuan Terbatas

Tatap Muka dan Rapat Umum

Tanggapan Responden	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Pernah	26	88
Tidak Pernah	2	6
Tidak Tahu	2	6
Jumlah	30	100 %

⁸ Sukandar (Sekretaris DPC PKS), *wawancara*, di Kecamatan Sail, 27 Februari 2010

Jika dilihat dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden pernah mengikuti kampanye pemilu, sebanyak 26 orang pernah mengikuti kampanye di pertemuan terbatas, tatap muka dan rapat umum. Dengan persentase 88 % dari mereka pernah mengikuti kampanye tersebut. Selebihnya, 6 % menjawab tidak pernah dan 6 % tidak tahu.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kampanye bisa dilakukan dengan menggunakan rapat tertutup, rapat umum dan pertemuan tertutup. Menurut Risman "dalam berkampanye, tidak hanya menggumpulkan massa di suatu tempat terbuka. Namun, bisa saja menggunakan rapat-rapat dari tim pemenangan pemilu, pertemuan kader-kader, dan lain sebagainya."⁹

Kampanye berhasil dilakukan apabila ada seorang juru kampanye yang handal. Dengan kata lain, kampanye bisa disebut sukses jika memiliki seorang juru kampanye yang mampu memobilisasi massa sedemikian rupa. Dengan catatan tidak mempersoalkan falsafah negara dan UDD '45. Seperti yang terlihat dari table di bawah ini :

Tabel IV. 3

Tanggapan Responden Yang Pernah Mendengar Jurkam
Mempersoalkan UUD '45

Tanggapan Responden	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Pernah	-	
Tidak Pernah	30	100 %
Tidak Tahu	-	
Jumlah	30	100 %

Jika dilihat dari tabel di atas. Dapat diketahui, bahwa dari responden yang pernah mengikuti kampanye politik, baik itu pada pertemuan terbatas, tatap muka dan rapat umum. Mereka sepakat tidak pernah mendengar seorang juru kampanye yang mempersoalkan

⁹ Risman (Ketua DPC PKS Sail), *wawancara*, di Kecamatan Sail, 25 Februari 2010

UUD'45 pada setiap kampanye. Dengan persentase 100 % dari 30 orang responden menjawab hal demikian.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pada dewan pengurus cabang PKS di sail. Tidak pernah menemukan seorang juru kampanye mempersoalkan UUD '45. menurut ketua dpc pks sail "selama kami melakukan kampanye, kami tidak pernah mendengar ada juru kampanye mempersoalkan UUD '45."¹⁰

Pada kampanye politik, kekuatan emosi massa yang tidak terkontrol dengan baik. Mampu menyebabkan terjadinya ucapan-ucapan yang menghina lawan politiknya. Keadaan yang demikian, tentu akan mengakibatkan kepada terjadinya pelanggaran. Bahkan juga bisa menjadi ajang adu fisik bila terdengar dari masing-masing kubu partai politik. Bisa dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel IV. 4

Responden Yang Pernah Mendengar Anggota Kampanye Menghina Lawan Politiknya

Tanggapan Responden	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Pernah	-	-
Tidak Pernah	21	70 %
Tidak Tahu	9	30 %
Jumlah	30	100 %

Jika dilihat dari hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa responden tidak pernah mendengar seorang peserta kampanye menghina lawan politiknya. Dengan kata lain, sebanyak 21 orang dari 30 orang responden, dengan persentase 70 % mengakui tidak pernah mendengar ada orang yang menghina lawan politiknya pada saat kampanye berlangsung. Selebihnya mengakui tidak tahu bahwa ada orang yang menghina lawan politiknya.

¹⁰ Risman (Ketua DPC PKS Sail), wawancara, di Kecamatan Sail, 25 Februari 2010

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa dari kampanye politik yang dilakukan partai keadilan sejahtera pada kampanye pemilu 2009 yang telah lalu, mereka tidak pernah mendengar ada seseorang menghina lawan politiknya. Hal ini juga diakui oleh ketua DPC PKS. Menurutnya, ”memang tidak pernah mendengar seseorang menghina lawan politiknya”.

Menurut jenisnya, kampanye memunculkan pesan kepada khalayak untuk pencitraan terhadap calon legislative dari masing-masing partai. Pencitraan itu dilakukan dengan menyisipkan pesan kepada calon pemilih bahwa pemilih tidak salah pilih dengan pilihannya. Namun, jika pesan itu tidak mempengaruhi calon pemilih. Maka seorang anggota kampanye kadangkala menebarkan ancaman atau gangguan kepada peserta kampanye yang lain. Bisa dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel IV. 5
Tanggapan Responden Yang Pernah Mendapat Ancaman Atau Gangguan Dari Peserta Kampanye Politik

Tanggapan Responden	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Pernah	10	33 %
Tidak Pernah	13	44 %
Tidak Tahu	7	23 %
Jumlah	30	100 %

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 10 orang atau 33 % dari 30 orang responden menjawab pernah mendapat ancaman atau gangguan yang dari peserta kampanye politik dalam kampanye. Selanjutnya, 13 orang atau 44 % dari 30 orang responden menjawab tidak pernah mendapat ancaman atau gangguan yang dari peserta kampanye politik. Selebihnya, 7 orang atau 23 % menjawab tidak tahu.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa ada yang mendapatkan gangguan pada kampanye 2009 yang lalu. Menurut Adib, ”kami mendapatkan gangguan itu, disebabkan

karena kami tidak berada di wilayah massa kami, dan gangguan itu berupa isu-isu yang miring tentang kami”.¹¹

Dalam berkampanye, tidak terlepas dari menggunakan peraga kampanye. Dengan kata lain, alat peraga kampanye sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan kampanye. Misalnya, spanduk, baliho, dan poster. Terkadang hilang, karena alat peraga itu tidak pada tempat massa yang banyak dari partai tertentu. Bisa dilihat dari tabel di bawah ini :

Table IV.6
Tanggapan Responden Yang Pernah Melihat Alat Peraga Hilang

Tanggapan Responden	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Pernah	10	33 %
Tidak Pernah	15	50 %
Tidak Tahu	5	17 %
Jumlah	30	100 %

Jika dilihat dari tabel di atas, sebanyak 10 orang atau 33 % dari 30 orang responden menjawab pernah melihat alat peraga kampanye hilang dari tempatnya. Selanjutnya, 15 orang atau 50 % dari peserta kampanye menjawab, tidak pernah melihat alat peraga hilang dari tempatnya. Selebihnya, 5 orang atau 17 % menjawab tidak tahu.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pada alat peraga yang digunakan oleh partai pks hilang dari tempatnya. Menurut Risman ”pada malam sebelum kampanye, kami memasang alat peraga di jalan-jalan. Namun, pada pagi harinya alat peraga itu telah hilang dari tempatnya”.¹²

Untuk mendukung kegiatan berkampanye. Terkadang partai menggunakan fasilitas dari pemerintahan. Misalnya, berkampanye di sekolah-sekolah, kantor-kantor, dan lain sebagainya. Bisa dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel IV. 7

¹¹ Adib (Kader DPC PKS sail), *wawancara*, di Kecamatan Sail, 30 Februari 2010

¹² Risman (Ketua DPC PKS Sail), *wawancara*, di Kecamatan Sail, 25 Februari 2010

Tanggapan Responden Yang Pernah Melihat Kampanye
Menggunakan Fasilitas Pemerintah

Tanggapan Responden	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Pernah	15	50 %
Tidak Pernah	5	17 %
Tidak Tahu	10	33 %
Jumlah	30	100 %

Jika dilihat dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 15 orang atau 50 % dari 30 orang responden menjawab pernah melihat kampanye menggunakan fasilitas pemerintah. Selanjutnya, 5 orang atau 17 % menjawab tidak pernah melihat kampanye menggunakan fasilitas pemerintah. Selebihnya, 10 orang atau 33 % menjawab tidak tahu.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa dari responden yang penulis temukan. Mereka mengaku pernah melihat ada tim kampanye dari partai lain yang menggunakan fasilitas pemerintah. Menurut Risman ”dalam partai kami, tidak ada hal itu terjadi. Sebab itu semua sudah bukan lagi merupakan tindakan yang benar menurut etika kampanye kami”.¹³

Dalam banyak kampanye. Terkadang calon pemilih dijanjikan dengan berbagai macam fasilitas. Baik itu untuk pembangun jalan, sekolah yang sudah tidak layak pakai. Jika pemilih bersedia memilih calon yang diangkat oleh partai tertentu. Terkadang, yang dijanjikan itu berupa materi. Bisa dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel IV. 8
Responden Yang Pernah Dijanjikan Untuk Diberikan Uang

Tanggapan Responden	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Pernah	-	-
Tidak Pernah	20	67 %

¹³ Risman (Ketua DPC PKS Sail), wawancara, di Kecamatan Sail, 25 Februari 2010

Tidak Tahu	10	33 %
Jumlah	30	100 %

Jika dilihat dari tabel di atas, sebanyak 20 orang atau 67 % dari 30 orang responden menjawab, pernah dijanjikan uang. Selebihnya, 10 orang atau 33 % menjawab tidak tahu. Dan ini sejalan dengan pernyataan ketua dpc pks "kami mengakui jika ada pelanggaran-pelanggaran pada kampanye pada pemilu yang telah lalu. Tapi, kalau menjanjikan untuk memberikan dan diberikan uang, itu tidak pernah terjadi".¹⁴

Untuk menyakinkan pemilih, bahwa pemilih tidak salah memilih calon legislative yang diusung partai. Biasanya, partai mengikut sertakan pejabat yang berasal dari partai tersebut. Bisa dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel IV. 9

Responden Yang Pernah Melihat Pejabat Pemerintahan Ikut Sebagai Juru Kampanye

Tanggapan Responden	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Pernah	6	20 %
Tidak Pernah	14	47 %
Tidak Tahu	10	33 %
Jumlah	30	100 %

Jika dilihat dari tabel di atas, sebanyak 6 orang atau 20 % dari 30 orang responden menjawab pernah melihat pejabat pemerintah ikut sebagai juru kampanye. Selanjutnya, sebanyak 14 orang atau 47 % menjawab tidak pernah melihat juru kampanye pejabat pemerintah. Selebihnya, 10 orang atau 33 % menjawab tidak tahu.

¹⁴Risman (Ketua DPC PKS Sail), wawancara, di Kecamatan Sail, 25 Februari 2010

B. Faktor Yang Menyebabkan Partai Keadilan Sejahtera Melanggar Aturan Kampanye

Pelanggaran-pelanggaran terjadi yang telah penulis paparkan diatas, di sebabkan oleh beberapa faktor, faktor tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pengawasan

Pengawasan dimaksudkan agar terwujudnya pemilu yang bersih, aman dan terkendali. Pengawasan ini di lakukan dari pihak-pihak yang mendukung kegiatan kampanye. Dan dalam hal ini, pengawasan itu dilakukan oleh tim pengawas pemilu, pengurus PK Sejahtera Sail. Sebab, menurut responden yang penulis temui, mengaku tidak pernah melakukan pengawan terhadap jalannya acara kampanye.¹⁵

b. Sosialisasi

Sosialisasi dimaksudkan untuk mendukung kegiatan pemilu yang bersih, aman dan tertib. Hal ini dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu. Sebab, pengakuan dari responden yang penulis temui. Mengaku tidak tahu akan adanya larangan dalam membawa peserta kampanye yang belum mempunyai hak pilih.¹⁶

c. Keadaan

Keadaan yang dimaksudkan adalah pada saat kampanye telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Dalam hal ini, diatur oleh komisi pemilihan umum (KPU), kampanye yang dilakukan oleh tim kampanye PK Sejahtera berada di waktu yang tidak tepat. Sebab, menurut pengakuan dari pengurus PK Sejahtera Sail mereka selalu

¹⁵ Budiman (Pengurus DPC PKS Sail), *wawancara*, di Kecamatan Sail. 27 Maret 2010

¹⁶ Yulia (Pengurus DPC PKS SAIL), *wawancara*, di Kecamatan Sail. 4 April 2010

mengadakan kegiatan keagamaan di mesjid-mesjid, pembinaan remaja di sekolah, dan lain sebagainya.¹⁷

d. Penerapan Sanksi

Penerapan sanksi dimaksudkan agar pada saat pemilu berlangsung. Sanksi yang diterapkan oleh pihak penyelenggara pemilu hanya sebatas memberikan peringatan kepada pihak yang menjadi peserta kampanye.¹⁸

C. Tinjauan Fiqh Siyasah

Memilih pemimpin merupakan salah satu keharusan yang tidak dapat dihindari dalam bermasyarakat dan bernegara. Apapun pilihannya, masing-masing harus mempertanggungjawabkan pilihannya kelak. Bukankah makhluk yang mulia adalah mereka yang hidup, dan yang lebih mulia dari yang hidup adalah mereka yang diberi wewenang untuk memilih dan dipilih, dan yang mulia dari yang memilih dan terpilih, adalah mereka yang dituntut untuk mempertanggungjawabkan hasil pilihannya dan terpilihnya. Kemudian yang termulia diantara mereka adalah yang lulus dalam pertanggungjawaban itu.

Kepemimpinan merupakan kenyataan yang penting dalam keberlangsungan dan kesinambungan hidup, lebih-lebih pada kehidupan manusia. Dapat dipastikan bahwa tidak ada satupun komunitas tanpa pemimpin, meski bentuk dan mekanisme pengangkatan dan pengantiannya sangat beragam.

Dalam terminologi siyasah, kepemimpinan diartikan juga sebagai *sulthon*, *syekh*, dan *rois*. Namun fungsi jabatannya tetap, yaitu untuk melindungi masyarakat dengan menjaga agama dan mengatur kehidupan dunia "*hirasatu al din wa siyasat al dunia*", menyuruh

¹⁷ Risman (Ketua DPC PKS Sail), *wawancara*, di Kecamatan Sail, 25 Maret 2010

¹⁸ Dasril (Ketua Panwaslu Kecamatan), *wawancara*, di Kecamatan Sail, 23 Februari 2010

(rakyat) untuk berbuat kebaikan dan mencegah (rakyat) dalam berbuat kerusakan “*al amru bil ma'ruf wa al nahyi 'anil munkar*”.

Kepemimpinan merupakan kenyataan yang penting dalam keberlangsungan dan kesinambungan hidup, lebih-lebih pada kehidupan manusia. Dapat dipastikan bahwa tidak ada satupun komunitas tanpa pemimpin, meski bentuk dan mekanisme pengangkatan dan penggantinya sangat beragam.

Mengingat betapa pentingnya fungsi tersebut maka kepemimpinan harus dijaga keberadaan dan kesinambungannya, meskipun mekanismenya bisa beragam dan berkembang sesuai situasi dan kondisi saat itu.

Di kalangan intelektual muslim ada wacana atau pemikiran mengenai proses dan mekanisme suksesi kepemimpinan, tetapi setiap wacana yang ada tetap mengacu kepada ketentuan syar'i. Sesuai telaah sejarah, ragam wacana suksesi tersebut ada tiga cara yang dilakukan; Pertama, melalui pemilihan langsung. Kedua, pemilihan tidak langsung. Ketiga, penunjukan langsung oleh pimpinan sebelumnya.

Keragaman mekanisme suksesi ini telah terjadi semenjak masa khulafa' al rasyidin dan sampai sekarang, dan di beberapa negara-negara Islam. Kenyataan ini menunjukkan bahwa mekanisme suksesi kepemimpinan bukan sesuatu yang baku. Dan ketidak bakuan mekanisme itu sendiri justru mencerminkan fleksibilitas tuntunan ajaran Islam. Karena kepemimpinan bukan tujuan. Kepemimpinan adalah sekadar alat dan jalan untuk melindungi masyarakat agar kehidupannya dapat mencapai maslahat dan terhindar dari kemudharatan, sebagaimana kaedah yang menyatakan :

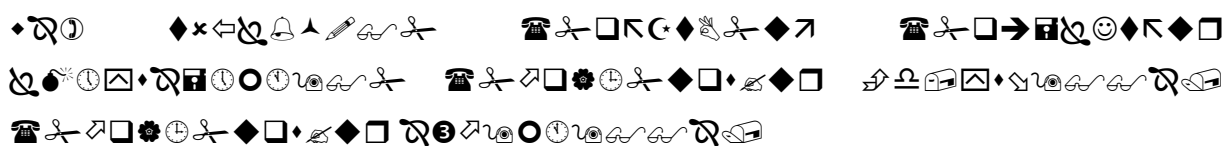
درء المفسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya :“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.¹⁹

Islam menuntun umatnya agar memilih dan mengangkat pemimpin. Tidak hanya dalam suatu masyarakat bangsa yang luas dan menetap dalam satu wilayah. Dalam perjalanan di tengah padang pasir sekalipun, walau hanya bertiga pengangkatan pemimpin diperlukan. Hal ini sesuai sabda Nabi SAW, yang artinya : “Apabila kamu dalam perjalanan, walau dipadang pasir, maka hendaklah mereka memilih salah seorang sebagai pemimpin”(H.R. Abu Daud).²⁰

Menurut al-Mawardy: “apabila kepala negara atau daerah telah melaksanakan apa yang telah kami sebutkan dari hak-hak rakyat, maka sungguh ia telah menunaikan hak Allah, baik yang berlaku untuk rakyat maupun yang berlaku terhadap diri mereka. Terhadap kepala negara wajiblah umat melaksanakan dua hak, yaitu: mentaati, mematuhi dan memberikan pertolongan selama kepala negara itu belum berubah keadaannya”.

Memberikan nasehat dorongan dan semangat merupakan suatu kewajiban yang harus dan mesti dilaksanakan, sebab pada prinsipnya sesama muslim mempunyai kewajiban untuk saling memberi nasehat tolong menolong satu sama lain Allah berfirman dalam surat al-Ashr ayat 3:



¹⁹ Abdul Hamid Hakim, *Mabady Awwaliyah*, (Padang Panjang: Sa’adiyah Putra 1927), Cet- 3., h. 35.

²⁰ Imam Nawawi, *Shahih Riyadhush-Shalihin*, Terj, Team KMCP (Jakarta : Pustaka Azzam, 2003), Cet-3, h,

Artinya :“*Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran*”.²¹

Jadi memberikan nasehat, kritik dan mengecam dengan cara yang tepat dan dibenarkan merupakan suatu kewajiban bagi para kaum muslimin sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas, maka hal yang demikian itu termasuk ke dalam amar ma'ruf nahi munkar.

Oleh karena itu, kekuasaan merupakan suatu amanah di dalam Islam dan segala orang yang dipercayakan amanah kepadanya maka dipertanggungjawabkan tentang apa yang diamanatkan kepadanya oleh yang mempunyai hak, maka Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan bertanggung jawab dengan apa yang diamanahkan kepadanya.²²

Pertanggungjawaban kepala negara di dalam Islam ialah pertanggungjawaban di hadapan rakyat dan Tuhan. Pertanggung jawaban di hadapan rakyat adalah karena ia menerima kekuasaan dengan melalui *baiat* yang diberikan kepadanya oleh rakyat. Rakyatlah yang memberikan kepadanya hak memerintah dan mengendalikan kekuasaan. Kepala negara tidak lain hanyalah wakil rakyat. Karenanya rakyat berhak meminta pertanggung jawaban kepada kepala negara. Rakyat yang berhak mengadakan *baiat*, berhak pula memberhentikannya, apabila diperoleh cukup alasan untuk itu. Umat atau rakyat adalah pengawas yang terus-menerus mengawasi tindak tanduk kepala negara dengan dasar keharusan menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran dan hak bermusyawarah serta kewajiban memberikan nasihat, teguran dan kecaman yang membangun. Apabila kepala

²¹ Al-Hakim, *al-Quran Dan Terjemahannya, Ayat Pojok Bergaris*, (Semarang: CV: Asy-Syifa', 1998), Cet-4., h. 482.

²² Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab*(Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), Cet-3., h. 172.

negara curang atau zalim atau mengabaikan hukum atau menyalahi syariat maka rakyat berhak menegur kepala negara itu atau memecatnya.

Al-Baghaday berkata: “apabila dia kepala negara menyimpang umat mempunyai hak untuk membawanya kembali kepada kebenaran atau menggantinya. Tindakan umat terhadap kepala negara sama dengan tindakan kepala negara terhadap para khalifah, hakim dan pegawainya. Jika mereka menyimpang dari kebenaran, dari jalan yang telah digariskan, kepala negara dapat menyadarkan mereka atau mengangkat orang lain.”²³

Al Mawardi berkata: “ Kepala Negara memiliki dua hak yang wajib kepada rakyat selama keadaannya belum berubah. Dan yang mengeluarkan kepala negara dari kedudukannya, ada dua perkara; pertama, cacat keadilannya dan kedua terdapat kekurangan padanya.”²⁴

Inilah suatu ketentuan yang nyata bagi pentingnya prinsip yang harus ditegakkan dalam undang-undang dasar.

Menurut al-Baqillani, tugas dan tujuan pemerintahan adalah untuk menegakkan hukum yang telah ditetapkan, membela ummat dari gangguan musuh, melenyapkan penindasan, dan menghilangkan keresahan dalam masyarakat, pemeratakan penghasilan negara bagi rakyat dan mengatur perjalanan haji dengan baik dan melaksanakan syari’at yang dibebankan kepadanya. Singkatnya segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum harus sesuai dengan syari’at.²⁵

Al Mawardi berpendapat lembaga *Imamah* mempunyai tugas dan tujuan umum:

1. Mempertahankan dan memelihara agama menurut prinsip-prinsipnya yang ditetapkan.

²³ *Ibid*, h. 173

²⁴ *Ibid*, h. 174

²⁵ Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyash*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), Ed-1., Cet-4, H. 260.

2. Melaksanakan kepastian hukum diantara pihak-pihak yang bersangketa atau berperkara dan berlakunya keadilan yang universal antara penganiaya dan yang dianiaya.
3. Melindungi wilayah islam dan memelihara kehormatan rakyat agar mereka bebas baik jiwa maupun harta.
4. Memelihara hak-hak rakyat dan hukum-hukum Tuhan.
5. Membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh .
6. Jihad terhadap orang-orang yang menentang islam setelah adanya dakwah agar mereka mengakui eksistensi islam.
7. Memungut pajak dan sedekah menurut yang diwajibkan syara', nash dan ijihad.
8. Mengatur penggunaan harta *baitul mal* secara efektif
9. Meminta nasehat dan pandangan dari orang-orang terpercaya
10. Dalam mengatur ummat dan memelihara agama pemerintah dan kepala negara harus langsung menanganinya dan meneliti keadaan yang sebenarnya.²⁶

Al Baghdadi menjelaskan seorang imam yang tanpa cacat dan tindakannya tidak bertentangan dengan syari'at umat wajib mendukung dan mentaatinya. Tapi bila ia menyimpang dari ketetapan syari'at, masyarakat harus memilih diantara dua tindakan kepadanya, yaitu: mengembalikannya dari berbuat salah kepada kebaikan, atau mencopot jabatannya dan memberikannya kepada orang lain.²⁷

Pelaksanaan syari'at dan terwujudnya kemashlatan rakyat menjadi tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan. Artinya kekuasaan politik adalah alat untuk melaksanakan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

seperangkat hukum yang disyariatkan oleh Allah dan alat untuk melaksanakan kemaslahatan rakyat ²⁸

Syariat adalah kemaslahatan yang bertujuan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, mewujudkan kemaslahatan menjaga dan memeliharanya serta mewujudkan kegembiraan pada manusia dengannya dan juga tujuan syariat adalah demi kebaikan dan kemaslahatan manusia. Memahami Tuhan, agama dan syariat berarti meyakini bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan yang mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan merupakan perintah agama dan menjadi tujuan syariat. Kemudian kita tetapkan amalan baik tersebut dan kita masukkan menjadi aturan legal demikian atas landasan kemaslahatan kita tetapkan, dan atas landasan kemaslahatan pula kita legalkan.

Islam sebagai Addin Allah yang memiliki berbagai unsur untuk kepentingan kehidupan manusia menganggap akhlaq atau moral sebagai satu unsur penting dalam arena politik ummatnya. Dalam sistem kampanye umpamanya, ummat Islam ditekankan untuk mengedepankan faktor etika atau akhlak mulia sebagai pemicu keberhasilan perjuangannya. Ia sangat dilarang untuk mengedepankan sikap bohong, mengadu domba, memfitnah dan seumpamanya. Para pakar siyasah menyifatkan kampanye demikian sebagai kampanye yang bersifat retorik. Ada beberapa prinsip moral yang ditetapkan syari'ah berkenaan dengan kampanye retorik menurut mereka antara lain:²⁹

Pertama, prinsip jujur dan benar dalam berkomunikasi dengan orang banyak, prinsip ini merujuk kepada ketentuan syari'ah yang menganjurkan semua muslim harus berlaku jujur dan benar. Ini berkaitan dengan firman Allah SWT, yaitu :

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

²⁸ Ibid.

²⁹ Lukman Thaib, *Politik Menurut Perspektif Islam*, (Malaysia:Synergymate Sdn. Bhd, 1998), hal. 135-136

Artinya: “tidak suatu ucapanpun yang diucapnya, melainkan ada di dekatnya pengawas yang selalu hadir”.(Q.S. Qaf: 18)

Selanjutnya, dalam sebuah hadits Rasulullah saw. telah bersabda:

اية المنافق ثلاث : اذا حدث كذب , و اذا وعد أخلف ,

و اذا اؤتمن خان

Artinya : “Terdapat tiga ciri orang munafik; apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji ia memungkiri, dan apabila diberi amanah ia mengkhianati”.³⁰

Dengan demikian prinsip kejujuran menjadi faktor utama dalam setiap kampanye pemilu bagi ummat Islam. Tidak boleh berbohong untuk menarik banyak suara kepada partai kita, tidak boleh mengancam agar semua orang menyusuk partai kita, tidak boleh memberi suap agar orang banyak memihak kepada kita, dan tidak boleh menghalalkan cara untuk mendapatkan satu kursi di parlemen sebagaimana yang terjadi pada zaman sebelumnya.

Dalam kampanye setiap peserta harus bisa mendapatkan sesuatu yang baru sebagai ilmu baru dari hasil kampanye tersebut, karena kampanye merupakan satu jenis pendidikan tidak resmi buat masyarakat. Karena itu pula tidaklah seorang juru kampanye memberikan pendidikan yang tidak bermoral kepada peserta kampanye karena itu akan berakibat fatal bagi kehidupan bangsa di masa depan. Ia bukan hanya sekedar bersorak sorai ketika seorang jurkam berkampanye dengan berapi-api, tapi yang lebih penting lagi adalah apa yang

³⁰ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, terj, As'ad Yasin dan Elly Latifa, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), cet-1, h, 33

disampaikan jurkam tersebut menyentuh kepentingan rakyat atau tidak, sesuai dengan ketentuan Islam atau menyimpang daripadanya.

Kedua, tidak mengotori kehormatan dan kemuliaan pihak lawan. Sabda Rasulullah saw.

المسلم على المسلم حرام : دمه وعرضه وما له كل (رواه مسلم)

Artinya : “Darah, harta benda dan kehormatan setiap orang Islam adalah haram diganggu”.³¹

Merujuk kepada dua poin di atas jelaslah bagi kita bahwa perkara-perkara polemik politik, dakwaan yang tidak berazas dan semua jenis kekerasan dalam kampanye pemilu adalah diharamkan oleh syari’ah. Untuk terlaksananya tata cara kampanye pemilu yang serasi dengan ketentuan syari’ah, maka pihak berkuasa negara mayoritas ummat Islam harus merujuk sepenuhnya kepada ketentuan Islam dalam operasional kampanye pemilu tersebut.

³¹ Imam Nawawi, *Shahih Riyadhush-Shalihin*, Terj. Team KMCP (Jakarta : Pustaka Azzam, 2003), cet-3, h, 407

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah penulis jelaskan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pada kampanye yang telah berlalu pelanggaran telah terjadi di DPC PKS sail.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Membawa peserta kampanye yang belum mempunyai hak pilih
2. Menggunakan fasilitas umum. Seperti, mesjid, sekolah dan lain sebagainya.
3. Mengganggu ketertiban umum

- b. Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran

1. Pengawasan

Pengawasan dimaksudkan agar terwujudnya pemilu yang bersih, aman dan terkendali.

2. Sosialisasi

Sosialisasi dimaksudkan untuk mendukung kegiatan pemilu yang bersih, aman dan tertib. Hal ini dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu.

3. Keadaan

Keadaan yang dimaksudkan adalah pada saat kampanye telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu.

4. Penerapan Sanksi

Penerapan sanksi dimaksudkan agar pada saat pemilu berlangsung. Sanksi yang diterapkan oleh pihak penyelenggara pemilu hanya sebatas memberikan peringatan kepada pihak yang menjadi peserta kampanye.

- c. Fiqh siyasah memandang, Pelanggaran terhadap undang-undang merupakan bentuk tindakan tidak taat terhadap pemimpin.

B. Saran

Hendaknya, pada pemilu yang akan datang kampanye yang akan dilakukan oleh DPC PKS Sail lebih tertib menurut undang-undang no 10 tahun 2008. Walaupun, pelanggaran yang terjadi hanya sebagian kecil dari ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, supaya lebih bersih dari kampanye-kampanye dari peserta pemilu yang lain. Sebab, dalam satu dari delapan etika kampanye PKS menyebutkan ishlah yaitu perbaikan. Pada pakteknya diharapkan memberikan nilai kemasalahatan, solusi, dan perbaikan bagi seluruh bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, Nashiruddin, Muhammad, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Terj, As'ad Yasin, Elly Latifa, cet-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Al-Hakim, *Al-Quran Dan Terjemahannya, Ayat Pojok Bergaris*, Semarang: CV: Asy-Syifa', 1998
- Ash Shiddieqy, Hasbi, Muhammad, Teungku, *Hukum-Hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang PT. Pustaka Rizki Putra, 2001
- Barut, Jamal, Muhammad dan Al-Raysuni, Ahmad, *Ijtihad*, Jakarta: Erlangga, 2002
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Ed-revisi, Cet-1. Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Cangara, Hafied, *Komunikasi Politik ; Konsep, Teori, dan Strategi*. Ed- 1.. Jakarta Rajawali Pers, 2009
- Hakim, Hamid, Abdul, *Mabady Awwaliyah*, Padang Panjang Sa'adiyah Putra 1927
- Khan, Mukhsin, Muhammad, *Shahih Bukhari*, vol. 1, Madinah: Dar Ahya Us-Sunnah al-Nabawiya, t.t.
- Muhammad Nasir al-Din al-Albani Muhyi al-Din Al-Nawawi, *Riyadh al-Shalihin*, ed-2, Beirut: Dar al-Maktab al-Islami, 1984
- Nawawi, Imam, *Shahih Riyadhush-Shalihin*, Terj, Team KMCP, Cet-3, Jakarta : Pustaka Azzam, 2003
- NIMMO, DAN, *Komunikasi Politik : Komunikator, Pesan, dan Media*. Penerjemah : Tjun Surjaman. Bandung, PT Remaja Rosdakarya. Cet-4, 2000
- Noer, Deliar, *Pengantar Kepemikiran Politik*, Jakarta Rajawali Press, 1983
- Omar, Toha, Yahya, Islam dan Dakwah, Jakarta : PT. Alwardi Prima 2004
- Pulungan, Sujuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran, sejarah, dan Pemikiran*..Ed-1, Cet-4,, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 1999
- Rais, Dhiauddin, Muhammad, *Teori Politik Islam*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Cet. I Jakarta Gema Insani Press, 2001
- Sastropetro, Santoso, *Propaganda... ialah satu bentuk Komunikasi massa*, Bandung Alumni, 1991

Susanto, Astrid., *Komunikasi dalam Teori dan Praktek*, cet-3, Jakarta Binacipta, 1998

Syukir, Asmuni, *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam* Surabaya : Al-Ikhas, t.t

Thaib, Lukman, *Politik Menurut Perspektif Islam*, Malaysia: Synergymate Sdn. Bhd., 1998

UU No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu

UUD'45 dan Amandemen kabinet Indonesia Bersatu

W. S. S. Poerwadarwinta, *Kamus Umum bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1983

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1	: Data Monografi Kelurahan Di Kecamatan Sail	15
Tabel II. 2	: Jumlah Penduduk Kecamatan Sail	16
Table IV. 1	: Tanggapan Responden Yang Pernah Mengikuti Kampanye Politik.....	50
Table VI. 2	: Tanggapan Responden Mengikuti Kampanye di Pertemuan Terbatas Tatap Muka dan Rapat Umum	51
Tabel IV. 3	:Tanggapan Responden Yang Pernah Mendengar Jurkam Mempersoalkan UUD '45	52
Tabel IV. 4	: Responden Yang Pernah Mendengar Anggota Kampanye Menghina Lawan Politiknya	53
Tabel IV. 5	: Tanggapan Responden Yang Pernah Mendapat Ancaman Atau Gangguan Dari Peserta Kampanye Politik.....	54
Table IV.6	: Tanggapan Responden Yang Pernah Melihat Alat Peraga Hilang	55
Tabel IV. 7	: Tanggapan Responden Yang Pernah Melihat Kampanye Menggunakan Fasilitas Pemerintah.....	56
Tabel IV. 8	: Responden Yang Pernah Dijanjikan Untuk Diberikan Uang ...	57
Tabel IV. 9	: Responden Yang Pernah Melihat Pejabat Pemerintahan Ikut Sebagai Juru Kampanye	58

ANGKET

KETENTUAN ANGKET

- Angket ini hanya bertujuan semata-mata untuk penelitian ilmiah
- Pengisian angket ini tidak ada hubungannya dengan studi dan pekerjaan anda
- Pengisian secara jujur sangat diharapkan menurut keadaan yang sebenarnya.
- Pilihlah jawaban yang menurut anda paling tepat dari beberapa jawaban yang disediakan dengan memberikan tanda silang (X) pada huruf a, b, dan c.
- Atas bantuannya dalam mengisi angket ini penulis ucapkan terima kasih

A. Daftar Pertanyaan

1. Apakah anda pernah mengikuti kampanye politik pada pemilu 2009 lalu?
 - a. Pernah
 - b. Tidak pernah
 - c. Tidak tahu
2. Saya pernah mengikuti kampanye yang dilakukan di tempat pertemuan terbatas, tatap muka dan rapat umum?
 - a. Pernah
 - b. Tidak Pernah
 - c. Tidak Tahu
3. Ketika mengikuti kampanye, apakah anda pernah mendengar juru kampanye yang ingin merusak atau mengubah UUD '45 dan membahayakan NKRI?
 - a. Pernah
 - b. Tidak Pernah
 - c. Tidak Tahu

4. Apakah anda pernah mendengar anggota kampanye menghina lawan politiknya atas dasar beda agama, suku, ras (sara)?
 - a. Pernah
 - b. Tidak Pernah
 - c. Tidak Tahu

5. Selama kampanye pernahkah anda mendapatkan ancaman atau gangguan dari peserta kampanye?
 - a. Pernah
 - b. Tidak Pernah
 - c. Tidak Tahu

6. Pernahkah anda melihat alat peraga kampanye hilang?
 - a. Pernah
 - b. Tidak Pernah
 - c. Tidak Tahu

7. Pernahkah anda mengikuti kampanye yang difasilitasi pemerintah seperti kantor camat, desa, tempat ibadah atau disekolah-sekolah?
 - a. Pernah
 - b. Tidak Pernah
 - c. Tidak Tahu

8. Selama kegiatan kampanye pernahkah anda dijanjikan untuk diberikan uang atau materi lainnya?
 - a. Pernah
 - b. Tidak Pernah
 - c. Tidak Tahu

9. Selama mengikuti kampanye pernahkah anda melihat pejabat pemerintah seperti PNS, kepala desa, polisi, tentara, yang ikut sebagai juru kampanye?
 - a. Pernah

- b. Tidak Pernah
- c. Tidak Tahu

PEDOMAN WAWANCARA

1. Kapan berdirinya DPC PKS di Sail?
2. Apakah bapak/ saudara pernah mengikuti kampanye, dan kampanye seperti apa yang pernah bapak ikuti?
3. Selama masa kampanye berlangsung, Apakah Bapak/ saudara ada mendengar seorang jurkam mempersoalkan UUD '45 dan yang menghina lawan politik yang berbau SARA?
4. Selama masa kampanye, apakah bapak / saudara pernah mendapatkan ancaman atau gangguan dari peserta kampanye dan melihat alat peraga kampanye hilang?
5. Apa pendapat Bapak/ saudara jika kampanye dilakukan di tempat-tempat seperti ibadah, sekolah dan kantor. Dan apakah dalam setiap kampanye pernah dijanjikan untuk diberikan uang?
6. Bagaimana menurut bapak/ saudara jika ada jurkam dari kalangan PNS, Polri, dan TNI dan apakah bapak/ saudara pernah melihatnya?
7. Selama masa kampanye berlangsung, bentuk pelanggaran-pelanggaran apa saja yang pernah bapak temukan?
8. Apakah bapak/ ibu/ saudara mengetahui adanya larangan-larangan yang ditetapkan UU, jika tidak mengetahui, apa sebabnya? Dan jika mengetahuinya, kenapa bapak/ ibu/ saudara/ tidak menaati UU tersebut, dan apa alasannya?

BIOGRAFI



Pri Hartono Simanjuntak, Lahir di Sei Tapung Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 29 Desember 1986 dari sepasang suami istri M. Darmawi dan Mardiana. Anak Pertama dari tiga bersaudara.

Pendidikan formal MIN Pematang Baru Kotamadya Tanjung Balai Medan dan meneruskan pendidikan ke Pondok Pesantren Darul Ulum Tandun (PPDUT) Selama 7 tahun. Setelah itu meneruskan ke jenjang perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru Pada Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum dengan Jurusan Jinayah Siyasah (JS) Strata I.

Pada tahun 2009/2010 telah dapat menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) dengan judul karya ilmiah *"Realisasi Pasal 84 Tentang Kampanye Politik Partai Keadilan Sejahtera Dewan Pengurus Cabang Sail Tinjauan Menurut Fiqh Siyasah"* dengan Indeks Prestasi sangat memuaskan (3.08).

